



**BAPPENAS**

**PENGEMBANGAN KERTAS KERJA**

# **PENILAIAN PEMBIAYAAN PROYEK DARI MITRA BILATERAL 2024**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL (BAPPENAS)**



## **TIM PENYUSUN**

### Penanggung Jawab:

Scenaider CH Siahaan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

### Pengarah:

Rd. Siliwanti, Direktur Pendanaan Bilateral

### Tim Perumus:

Ahmad Fitriyadi, Afrian Iskandar, Dimas Effendy Hartanto, Husnul Hayyah, Krisdayanti Aprilia, Mesi Purnamasari, Mohamad Firda Fauzan, Rayhan Rahmanda Arifin, Rian Wicaksana, Uthami Sary, Wiwit Widodo, Zahra Mufidah

### Tim Konsultan:

Imaddudin Abdullah, Sandy Juli Maulana, Yorga Permana

### Kelompok Diskusi:

Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Direktorat Pendanaan Multilateral, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan

### Tim Pendukung:

Annisa Rahma Cantika, Andri Setiawan, Asslamatuz Zahra Sekarini Wiebowo, Ivan Andikhairi, Prasyda Darmayu Atina, Tiara Anggraeni, Solichin, Subur

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
1. PENDAHULUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	5
3. POSISI KERTAS KERJA .....	6
4. KERANGKA TEORI DIMENSI PEMBIAYAAN BILATERAL .....	9
5. KERTAS KERJA PEMBIAYAAN BILATERAL .....	28
5.1 KRITERIA DALAM DIMENSI KEUANGAN.....	29
5.2 KRITERIA DALAM DIMENSI TEKNIKAL.....	35
5.3 KRITERIA DALAM DIMENSI POLITIK DAN EKONOMI .....	42
5.4 KRITERIA DALAM DIMENSI HUKUM DAN PERATURAN .....	46
6. PROSES PEMBOBOTAN MELALUI METODE <i>AHP</i> .....	50
7. PILOT TEST DAN UMPAN BALIK .....	54
8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	56
REFERENSI.....	60

# 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan penyesuaiannya dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia telah menetapkan berbagai prioritas strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Visi ini memfokuskan pada penciptaan Indonesia yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan proyek pembangunan melalui kerja sama dengan mitra bilateral memiliki peran yang semakin strategis, tidak hanya sebagai sumber dana pembangunan tetapi juga sebagai sarana transfer pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut selaras dengan prioritas nasional dan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan, diperlukan sebuah mekanisme penilaian yang komprehensif dan dinamis terhadap sumber pembiayaan proyek yang berasal dari mitra bilateral.

Urgensi penilaian pembiayaan proyek mitra bilateral juga didasari oleh perubahan status ekonomi Indonesia dari negara *Lower Middle-Income Countries* (LMIC) menjadi negara berkategori *Upper Middle-Income Countries* (UMIC). Selain itu, Indonesia juga menjadi negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada bulan Juli tahun 2024. Perubahan status ini memberikan tantangan dalam mengakses dana hibah dan kondisi pinjaman yang lebih murah dari lembaga internasional dan bilateral. Dibandingkan LMIC, negara-negara UMIC memiliki akses yang lebih terbatas kepada skema pendanaan *Official Development Assistance* (ODA) sehingga mereka memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif dalam mengelola dan memobilisasi sumber pembiayaan untuk pembangunan.

Direktorat Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas, memiliki peran strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Direktorat ini bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta menyusun prakarsa strategis terkait pendanaan luar negeri bilateral. Fungsi ini

mencakup perumusan kebijakan, penyusunan rencana kerja sama, hingga pengendalian pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pendanaan bilateral dan kredit ekspor.

Sebagai salah satu upaya strategis, Direktorat Pendanaan Bilateral mengembangkan Kertas Kerja Penilaian Pembiayaan Proyek dari Mitra Bilateral. Kertas kerja ini merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan serta rencana aksi dalam konteks pembiayaan proyek bilateral. Fokus utamanya adalah menyediakan kerangka kerja penilaian yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam memilih negara pemberi pinjaman (lender) yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia.

Kerangka kerja ini dirancang untuk mendukung target RPJMN 2025–2029 dan visi RPJPN 2025–2045, dengan mempertimbangkan ketentuan dan standar internasional yang relevan bagi negara kategori UMIC. Dengan pengembangan kertas kerja ini, diharapkan Direktorat Pendanaan Bilateral memiliki panduan strategis dan operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kertas kerja ini bertujuan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan pembiayaan proyek dari mitra bilateral secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

## **2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Kertas Kerja Penilaian Pembiayaan Proyek dari Mitra Bilateral meliputi:

1. Analisis Kebijakan dan Regulasi Terkait: Melakukan kajian mendalam terhadap kerangka regulasi dan kebijakan yang berlaku untuk pembiayaan proyek dari mitra bilateral. Kajian ini mencakup analisis kesesuaian dengan standar internasional, regulasi nasional, serta prioritas pembangunan strategis Indonesia.
2. Pengembangan Kriteria Penilaian: Menyusun kriteria penilaian pembiayaan proyek yang mencakup empat dimensi utama, yaitu keuangan, teknis, ekonomi dan politik, serta hukum dan regulasi. Kriteria ini dirancang untuk memastikan

evaluasi yang komprehensif, relevan dengan kebutuhan strategis nasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

3. Penyusunan Kertas Kerja: Merumuskan kerangka kerja penilaian yang berbasis metode Analytical Hierarchical Process (AHP). Proses ini mencakup penentuan bobot kepentingan masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan alat bantu evaluasi yang objektif dan dapat diterapkan pada berbagai skenario proyek.
4. Uji Coba Kertas Kerja: Melakukan piloting terhadap kerangka kerja yang telah dikembangkan dengan menerapkannya pada studi kasus tertentu. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan, validitas, dan relevansi kerangka kerja dalam konteks nyata.
5. Finalisasi dan Panduan Implementasi: Memfinalisasi kertas kerja berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi, serta menyusun panduan implementasi untuk memastikan penggunaan yang konsisten, praktis, dan berkelanjutan dalam pengelolaan pembiayaan proyek dari mitra bilateral.

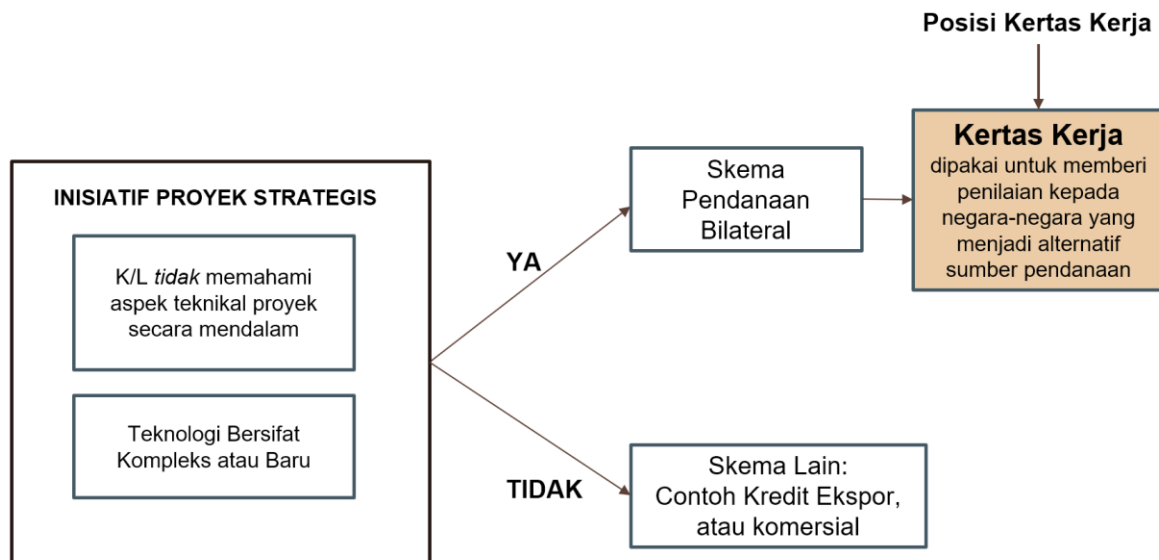
Dengan ruang lingkup ini, pengembangan kertas kerja diharapkan mampu menyediakan panduan strategis yang komprehensif dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam memilih mitra pemberi pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

### **3. POSISI KERTAS KERJA**

Kertas kerja berfungsi sebagai alat strategis untuk menilai negara-negara pemberi pinjaman yang menjadi alternatif sumber pendanaan dalam skema pendanaan bilateral. Posisi kertas kerja berada pada tahap pengambilan keputusan setelah terdapat inisiatif proyek strategis yang memenuhi dua kriteria utama:

1. Ketidakmampuan Kementerian/Lembaga (K/L) memahami aspek teknis proyek secara mendalam, yang mengindikasikan kebutuhan akan keahlian teknis dari mitra bilateral.
2. Proyek menggunakan teknologi yang bersifat kompleks atau pengetahuan yang baru, yang membutuhkan dukungan pendanaan, transfer teknologi, serta pengetahuan dari mitra bilateral.

Jika proyek memenuhi kriteria tersebut dan diarahkan untuk menggunakan skema pendanaan bilateral, kertas kerja digunakan untuk memberikan penilaian menyeluruh terhadap negara pemberi pinjaman berdasarkan kerangka evaluasi yang komprehensif. Namun, apabila proyek tidak memenuhi kriteria ini, skema pendanaan lain, seperti kredit ekspor atau pendanaan komersial, dapat dipertimbangkan tanpa memerlukan evaluasi mendalam melalui kertas kerja.



**Gambar 1 – Posisi Kertas Kerja dalam Inisiatif Proyek Strategis**

Kertas kerja dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan melalui dua jenis asesmen utama:

1. *Retrospective Assessment:*

Mengacu pada evaluasi data historis untuk menilai hasil proyek sebelumnya dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek tersebut. Dalam konteks ini, asesmen retrospektif memanfaatkan data dari proyek-proyek terdahulu untuk mengidentifikasi pola, keunggulan, atau kelemahan dari negara pemberi pinjaman untuk suatu proyek yang spesifik di sektor tertentu.

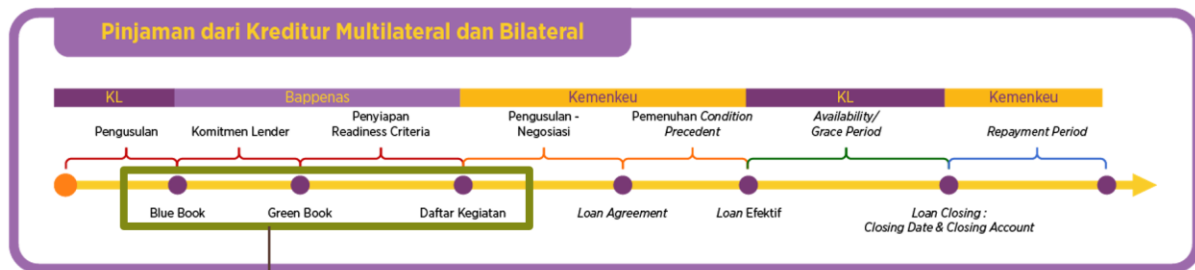
2. *Prospective Assessment:*

Mengacu pada evaluasi yang berfokus pada skenario, dampak, dan hasil potensial dari suatu proyek di masa depan. Dalam asesmen ini, kertas kerja dapat mengevaluasi proposal, rencana, atau komitmen negara pemberi pinjaman untuk suatu proyek spesifik di masa depan.

Meskipun kertas kerja bertujuan untuk mengintegrasikan kedua jenis asesmen ini, fokus utama pada tahap awal adalah *Retrospective Assessment*, karena data historis yang tersedia memberikan dasar empiris untuk memahami pola dan rekam jejak negara pemberi pinjaman. Integrasi dengan *Prospective Assessment* akan ditambahkan seiring pengembangan kerangka kerja lebih lanjut, guna memberikan pandangan holistik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengembangan kertas kerja ini bertujuan untuk merumuskan alat penilaian yang komprehensif dalam memilih sumber pinjaman. Alat ini tidak hanya mendukung transformasi proses bisnis internal pemerintah, tetapi juga menjawab tantangan global yang berkembang pesat. Melalui pendekatan yang terstandarisasi dan transparan, alat ini akan memperkenalkan proses evaluasi pendanaan yang sistematis, sehingga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan pemerintah.

Dengan adanya kerangka penilaian yang terstruktur, pemerintah Indonesia akan dapat memastikan bahwa semua faktor relevan—mulai dari aspek keuangan, teknis, hingga keberlanjutan—dipertimbangkan secara holistik. Langkah ini tidak hanya mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional tetapi juga memperkuat daya saing dan ketahanan Indonesia di tengah lanskap global yang terus berubah.



Sumber: Profil Pengelolaan Pinjaman Pemerintah | djppr.kemenkeu.go.id

Posisi Kertas Kerja

**Gambar 2 – Posisi Kertas Kerja dalam Alur Pengelolaan Pinjaman Pemerintah**

## 4. KERANGKA TEORI DIMENSI PEMBIAYAAN BILATERAL

Dalam dinamika global yang semakin kompleks, negara berkembang tidak lagi sekadar menjadi penerima pasif dalam hubungan pembiayaan internasional. Sebaliknya, mereka memiliki kemampuan untuk memilih di antara berbagai pemberi pinjaman yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pembangunan mereka (Bunte, 2019). Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma, di mana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin berperan aktif dalam menentukan sumber pembiayaan yang paling sesuai dengan prioritas dan strategi nasional.

Munculnya pemberi pinjaman baru seperti negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina) memberikan alternatif bagi negara berkembang untuk mengeksplorasi opsi pembiayaan di luar pemberi pinjaman tradisional dari institusi multilateral, Amerika Serikat, dan Eropa. Dengan kehadiran opsi ini, pemerintah dapat memanfaatkan peluang yang lebih luas untuk memilih sumber pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan, tetapi juga memberikan nilai tambah seperti transfer teknologi atau pembangunan kapasitas lokal.

Dalam konteks teori berbasis kebutuhan (*needs-based theory*), pemilihan pemberi pinjaman menjadi lebih strategis. Negara debitur dapat menggunakan pemberi pinjaman tertentu untuk tujuan tertentu, karena keahlian setiap pemberi pinjaman dapat berbeda-beda. Misalnya, beberapa pemberi pinjaman mungkin lebih unggul dalam menyediakan teknologi di bidang energi terbarukan atau di kereta api, sementara negara yang lain memiliki keunggulan dalam menawarkan persyaratan pembiayaan yang fleksibel. Oleh karena itu, memiliki alat evaluasi yang komprehensif untuk menilai sumber pinjaman menjadi sangat penting.

Untuk menciptakan alat evaluasi yang komprehensif, kriteria pembiayaan dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama yang mencakup berbagai aspek strategis dalam hubungan pembiayaan bilateral. Dimensi Keuangan mencakup efektivitas dan keberlanjutan biaya pembiayaan, termasuk tingkat biaya utang, syarat pinjaman, jumlah maksimum pinjaman, komitmen jangka panjang, serta diversifikasi portofolio utang, untuk memastikan dukungan finansial yang efisien tanpa membebani negara penerima. Dimensi Teknis menilai kontribusi teknis negara pemberi pinjaman, seperti studi kelayakan, tingkat inovasi, potensi transfer teknologi, dukungan keahlian, dan bantuan pembangunan, sehingga proyek dapat berhasil dan kapasitas lokal

meningkat. Dimensi Ekonomi dan Politik fokus pada stabilitas geopolitik, hubungan diplomatik, komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), serta risiko politik, yang menentukan kelancaran dan keberlanjutan proyek. Sementara itu, Dimensi Hukum dan Regulasi meliputi komitmen negara pemberi pinjaman terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG), perlindungan data, kebijakan lingkungan, dan kesesuaian dengan kebijakan industri nasional, untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan standar hukum, etika, dan keberlanjutan nasional maupun internasional.

### **A. Dimensi Keuangan**

Dalam konteks penilaian pembiayaan dari mitra bilateral untuk proyek-proyek pembangunan, Dimensi Keuangan mencakup evaluasi kelayakan finansial dan keberlanjutan proyek, memastikan keselarasan proyek dengan prioritas ekonomi, dan mengelola risiko secara efektif. Evaluasi ini membantu menentukan bagaimana proyek dapat dibiayai dengan cara yang mendorong pembangunan jangka panjang sekaligus menjaga kesehatan fiskal.

Inti dari setiap proyek yang dibiayai melalui perjanjian bilateral adalah penilaian kelayakan keuangan. Kelayakan keuangan menilai apakah suatu proyek dapat menutupi biaya dan kewajiban finansialnya dari pendapatan yang dihasilkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti arus kas, biaya, dan persyaratan pendanaan. Selain itu, proyek harus dievaluasi terhadap risiko mata uang, fluktuasi suku bunga, dan risiko kredit. Faktor-faktor ini secara signifikan dapat mempengaruhi biaya pendanaan dan kemampuan proyek untuk memenuhi komitmen keuangannya. Strategi manajemen risiko yang efektif harus diterapkan untuk memitigasi risiko-risiko ini, memastikan bahwa risiko-risiko tersebut tidak membahayakan keberhasilan proyek, atau stabilitas keuangan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Salah satu contohnya, China merupakan kreditur bilateral resmi terbesar di dunia, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika perekonomian global melalui praktik pemberian pinjamannya yang substansial. Berbeda dengan *concessional loans* tradisional yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga seperti World Bank, yang

dirancang untuk mendukung pembangunan dengan persyaratan yang menguntungkan seperti suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pembayaran yang diperpanjang, persyaratan pinjaman China biasanya tidak terlalu lunak dan lebih dekat dengan kondisi pasar (Morris dkk, 2020). Pendekatan ini dapat memberikan beban keuangan yang lebih besar pada negara-negara peminjam, karena persyaratannya mencakup suku bunga yang lebih tinggi dan masa tenggang yang lebih pendek, sehingga menantang keberlanjutan utang negara-negara tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa *cost of fund* dari China tidak bisa disamakan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Sebagai contoh, *interest rate* yang ditawarkan oleh China Development Bank dan BUMN China lainnya lebih berorientasi kepada profit dan menawarkan skema yang lebih kaku dibandingkan pinjaman dari China Eximbank sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2 (Morris dkk, 2020).

**Tabel 1 –Perbedaan pembiayaan pinjaman China dan World Bank**

Entity	Average loan size (USD million)	Interest Rate (weighted mean)	Maturity (weighted mean)	Grace period (weighted mean)
China	\$670	5.30%	16.6 years	3.9 years
World Bank	\$230	2.75%	11.8 years	7.1 years

**Tabel 2 –Perbedaan pembiayaan pinjaman beragam institusi di China**

	Percent of Total Funding	Average loan size (USD million)	Interest Rate (weighted mean)	Maturity (weighted mean)	Grace period (weighted mean)
China Development Bank	28%	\$1,050	5.75%	16.3 years	3.7 years
China Eximbank	42%	\$250	3.32%	17.2 years	5.6 years
China State-Owned Commercial Banks	3%	\$680	3.84%	12.6 years	3.9 years
Co-Finance Projects	10%	\$560	2.41%	14.7 years	4.5 years

### **1. Cost of debt and lending terms**

Biaya utang dan syarat pinjaman adalah metrik keuangan yang mencerminkan tingkat efektivitas biaya yang dikeluarkan proyek atas dana pinjaman dari pihak pemberi pinjaman. Faktor-faktor seperti suku bunga, masa tenggang (grace period), dan jangka waktu pinjaman sangat memengaruhi besarnya total biaya yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Komponen ini penting karena memberikan gambaran tentang seberapa kompetitif syarat pendanaan yang ditawarkan. Biaya pinjaman yang terlalu tinggi atau syarat yang tidak fleksibel dapat menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan terhadap anggaran proyek, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan. Dengan mengevaluasi syarat pinjaman ini secara komprehensif, pemerintah dapat memilih mitra pendanaan yang menawarkan biaya rendah dengan fleksibilitas tinggi, memastikan keberlanjutan finansial proyek dan mengurangi risiko gagal bayar

### **2. Maximum loan amount**

Jumlah pinjaman maksimum adalah kapasitas dana maksimum yang dapat diberikan oleh pemberi pinjaman, proporsional terhadap nilai proyek. Komponen ini penting karena menentukan kemampuan pendanaan proyek secara penuh, terutama untuk proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan investasi besar. Jika jumlah pinjaman yang ditawarkan terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan proyek, pelaksanaannya dapat terganggu akibat kekurangan dana sehingga pemerintah perlu mencari alternatif tambahan pendanaan. Dengan mengevaluasi jumlah pinjaman maksimum, pemerintah dapat memastikan bahwa mitra pendanaan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk mendukung proyek secara optimal. Selain itu, jumlah pinjaman maksimum juga mencerminkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap risiko proyek dan kapasitas fiskal negara penerima.

### **3. Long-Term Financial Commitment**

Komitmen finansial jangka panjang mencerminkan kemauan dan kemampuan pemberi pinjaman untuk mendukung proyek dalam jangka waktu yang lama, terutama untuk proyek infrastruktur yang memerlukan pendanaan

berkelanjutan. Proyek-proyek berskala besar sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai, sehingga penting bagi pemberi pinjaman untuk tetap berkomitmen hingga proyek rampung. Jika pemberi pinjaman tidak memiliki komitmen finansial yang stabil, proyek berisiko terhenti akibat kekurangan dana di tengah jalan. Evaluasi terhadap komitmen jangka panjang ini membantu memastikan bahwa pendanaan tersedia sepanjang siklus hidup proyek, memberikan kepastian finansial, dan mendukung keberhasilan proyek tanpa hambatan keuangan.

#### **4. Transparency and accountability**

Transparansi dan akuntabilitas dari negara pemberi pinjaman (lender) mencakup pelaporan yang jelas, pengungkapan informasi keuangan, serta kepatuhan terhadap praktik tata kelola yang baik dalam proses penyaluran dana pinjaman. Komponen ini penting untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pemberian pinjaman dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk negara penerima pinjaman dan masyarakat internasional. Ketidaktransparanan dalam proses ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, munculnya konflik kepentingan, dan menurunkan kepercayaan negara penerima terhadap pemberi pinjaman. Dengan menetapkan transparansi dan akuntabilitas sebagai kriteria utama, pemerintah dapat menilai kredibilitas lender, memastikan bahwa dana disalurkan sesuai perjanjian, dan meminimalkan potensi hambatan administratif atau konflik selama pelaksanaan proyek. Hal ini juga mendukung keberhasilan proyek melalui kerjasama bilateral yang berbasis pada kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar internasional.

#### **5. Currency stability**

Stabilitas nilai tukar mengacu pada tidak adanya fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, yang dapat memengaruhi jumlah pembayaran kembali dalam mata uang asal peminjam. Ketidakstabilan nilai tukar dapat meningkatkan risiko pembayaran utang, terutama jika proyek dibiayai dalam mata uang asing. Komponen ini penting untuk memastikan bahwa biaya total proyek dapat diprediksi dan risiko tambahan akibat perubahan nilai tukar dapat

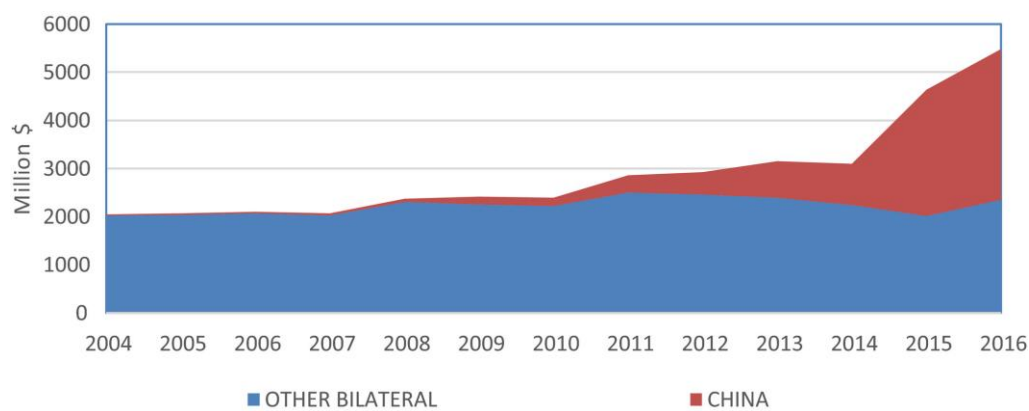
diminimalkan. Dengan menilai stabilitas nilai tukar, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek tidak menghadapi hambatan keuangan akibat fluktuasi kurs yang tidak terduga, sehingga menjaga keberlanjutan keuangan proyek.

## **6. Diversification of debt portfolio**

Diversifikasi portofolio utang adalah strategi menyebarkan pinjaman ke berbagai pemberi pinjaman, mata uang, dan instrumen untuk mengurangi risiko keuangan. Ketergantungan pada satu sumber pinjaman atau instrumen tertentu dapat meningkatkan risiko akibat volatilitas pasar, perubahan kondisi keuangan global, atau bahkan risiko politik yang berasal dari pemberi pinjaman tertentu. Dengan mendiversifikasi portofolio utang, pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan pasar, mengurangi tekanan pada ekonomi domestik, dan meningkatkan stabilitas fiskal jangka panjang. Selain itu, diversifikasi mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan struktur utang sehingga lebih fleksibel terhadap berbagai kondisi ekonomi global.

Sebagai contoh, jika Indonesia terlalu bergantung pada satu negara seperti Jepang sebagai sumber utama pinjaman, risiko terkait ketergantungan menjadi lebih tinggi. Misalnya, jika Jepang mengalami tekanan ekonomi, perubahan kebijakan suku bunga, atau penurunan kemampuan untuk memberikan pinjaman akibat faktor internal, hal tersebut dapat berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan lanjutan. Selain itu, fokus pada satu mitra dapat membatasi opsi pendanaan dan potensi kerja sama dengan pemberi pinjaman lain yang mungkin menawarkan syarat lebih kompetitif. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari berbagai negara seperti Uni Eropa, China, Korea Selatan, atau lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), Indonesia dapat mengurangi risiko tersebut. Diversifikasi ini memberikan stabilitas lebih baik dalam mengelola utang sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas untuk mendukung pembangunan nasional.

Contoh nyata dampak buruk dari ketergantungan yang tinggi terlihat pada kasus Kenya, yang menghadapi ancaman krisis utang akibat dominasi pembiayaan dari China. Pada 2010, kredit bilateral China hanya mencakup 7,3% dari total utang bilateral Kenya. Namun, pada 2016, proporsi tersebut meningkat drastis menjadi 57%, memperlihatkan bagaimana ketergantungan terhadap satu pemberi pinjaman dapat memperbesar risiko ekonomi negara (Onjala, 2017). Kasus ini menegaskan pentingnya diversifikasi sebagai langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional.



**Gambar 3 – Posisi Utang Kenya Terhadap China dan Negara Lain (Onjala, 2017)**

## **B. Dimensi Teknikal**

Dalam bidang pembiayaan bilateral untuk proyek-proyek pembangunan, *technical assessment* atau penilaian teknis berfungsi sebagai landasan penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya layak tetapi juga terstruktur untuk memanfaatkan teknologi dan metodologi terbaik yang tersedia. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proyek dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang tinggi, dapat mencapai hasil yang diharapkan secara efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

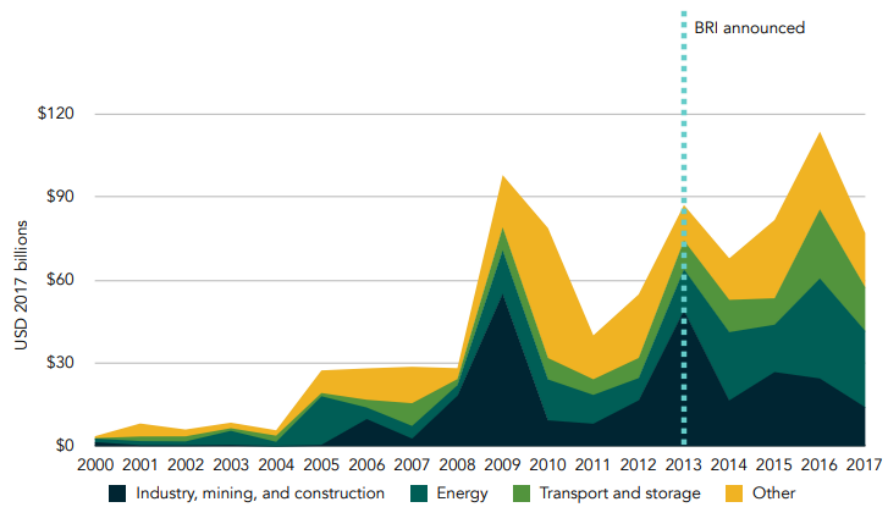
Penilaian teknis mencakup berbagai pertimbangan, mulai dari studi kelayakan awal yang menganalisis apakah tujuan proyek dapat dicapai dengan sumber daya dan teknologi yang diusulkan, hingga integrasi inovasi yang dapat meningkatkan hasil proyek. Hal ini termasuk mengevaluasi kemampuan teknis dan infrastruktur negara

penerima, serta keselarasan proyek dengan tren teknologi saat ini dan sumber daya teknis lokal.

Untuk proyek-proyek yang didanai melalui perjanjian bilateral, penilaian teknis juga memastikan bahwa inisiatif tersebut mendukung transfer dan adaptasi teknologi, mengembangkan kemampuan lokal dan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek. Aspek evaluasi teknis ini membantu dalam membangun dan meningkatkan keahlian lokal, memungkinkan negara tuan rumah untuk mengelola dan mempertahankan proyek secara mandiri di masa depan.

Dalam aspek teknis yang berkaitan dengan pembiayaan bilateral, pendekatan China sering kali mencakup persyaratan khusus yang terkait dengan perjanjian utangnya, yang secara signifikan dapat menentukan hasil proyek dan dampak ekonomi di negara-negara penerima. Contoh yang relevan adalah pendanaan infrastruktur yang diberikan oleh China Exim Bank (Chexim) kepada Kenya. Menurut Onjala (2017), pengaturan ini merupakan bentuk utang bersyarat yang mewajibkan pemilihan perusahaan China sebagai kontraktor untuk proyek yang didanai. Selain itu, peraturan ini mengharuskan setidaknya 50% peralatan, material, layanan, atau teknologi proyek bersumber dari China. Bentuk bantuan terikat ini tidak hanya menjamin penggunaan produk dan layanan China, namun juga secara langsung memengaruhi manfaat ekonomi yang mengalir kembali ke China, dan tidak memberikan manfaat penuh bagi perekonomian lokal negara penerima.

**Gambar 4 – Komitmen pendanaan pembangunan China berdasarkan sektor (Onjala, 2017)**



Source: AidData.

Praktik ini memberikan contoh bagaimana persyaratan teknis dan spesifikasi proyek yang dijabarkan dalam perjanjian pendanaan bilateral dapat mempunyai implikasi yang lebih luas. Meskipun kondisi seperti ini dapat mempercepat pengembangan proyek berkat tersedianya sumber bahan dan layanan, hal ini juga dapat membatasi pengembangan industri lokal dan mengurangi potensi lapangan kerja lokal dan transfer teknologi. Skenario ini menyoroti interaksi yang kompleks antara pendanaan dan kriteria teknis dalam perjanjian bilateral, dimana manfaatnya sangat terkait dengan kepentingan strategis negara kreditor, dalam hal ini, China, yang berpotensi mengorbankan maksimalisasi hasil pembangunan lokal di negara penerima.

## 1. Feasibility Studies

Feasibility studies menilai kualitas dokumen evaluasi kelayakan yang disediakan oleh negara pemberi pinjaman, mencakup aspek teknis, ekonomi, hukum, dan penjadwalan. Komponen ini penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan tentang apakah sebuah proyek layak untuk dilaksanakan. Studi kelayakan yang berkualitas memastikan bahwa semua aspek proyek telah dianalisis secara komprehensif, sehingga meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Penilaian terhadap kualitas studi ini juga mencerminkan kesiapan dan pemahaman pemberi pinjaman terhadap kompleksitas proyek,

sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung implementasi yang berhasil.

## **2. Innovation and Expertise Level**

Innovation and expertise level menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman memiliki tingkat inovasi dan kepakaran yang relevan dengan proyek spesifik yang didanai. Fokus utama komponen ini adalah kemampuan negara pemberi pinjaman untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan teknologi terkini yang menunjang keberhasilan proyek. Tingkat inovasi yang tinggi mencerminkan kemampuan negara tersebut dalam menciptakan solusi teknis yang efisien dan efektif, sekaligus menunjukkan keunggulan dalam riset dan pengembangan. Namun, komponen ini tidak mengevaluasi sejauh mana teknologi atau keahlian tersebut dibagikan kepada penerima proyek. Dengan demikian, evaluasi ini membantu pemerintah memahami keunggulan teknis pemberi pinjaman dalam mendukung keberhasilan proyek melalui penerapan teknologi mutakhir.

## **3. Technology Transfer Potential and Comprehensive Expertise Support**

Technology transfer potential and comprehensive expertise support menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman bersedia berbagi teknologi dan memberikan pendampingan teknis kepada penerima proyek. Komponen ini berfokus pada kemampuan pemberi pinjaman untuk membangun kapasitas lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan teknologi yang dapat diadaptasi oleh negara penerima. Berbeda dengan tingkat inovasi, komponen ini mengukur komitmen pemberi pinjaman untuk memberikan dukungan langsung kepada penerima proyek, termasuk membantu menyelesaikan tantangan teknis dan meningkatkan kemampuan penerima untuk mengelola proyek secara mandiri di masa depan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya selesai tetapi juga memberikan dampak jangka panjang melalui penguatan kapasitas lokal.

## **4. Development Assistance Provision**

---

Development assistance provision menilai kemampuan pemberi pinjaman untuk menyediakan dukungan teknis, keuangan, dan infrastruktur yang relevan dengan tujuan pembangunan proyek. Komponen ini penting karena memastikan bahwa pemberi pinjaman tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga ekosistem pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Bantuan yang dirancang dengan baik dapat mempercepat implementasi, meningkatkan kapasitas lokal melalui transfer keahlian, dan menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dengan menilai kemampuan pemberi pinjaman dalam menyediakan bantuan pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek tidak hanya mencapai target utamanya tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

#### **5. Flexible Conditionality and Support**

Flexible conditionality mengukur sejauh mana pemberi pinjaman memberikan perjanjian pembiayaan yang fleksibel, tanpa memberlakukan persyaratan kaku seperti kewajiban menggunakan vendor, tenaga kerja, atau sumber daya manusia dari negara pemberi pinjaman. Fleksibilitas ini penting karena memungkinkan penerima pinjaman untuk memanfaatkan sumber daya lokal, memperkuat kapasitas tenaga kerja dalam negeri, dan memastikan bahwa manfaat proyek dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lokal. Dengan mekanisme dukungan yang adaptif, penerima pinjaman memiliki kendali lebih besar untuk menentukan bagaimana proyek dikelola. Semakin fleksibel syarat yang ditawarkan, semakin besar peluang untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan jangka panjang melalui penguatan kapasitas lokal. Hal ini memastikan bahwa proyek tidak hanya memenuhi tujuan utama, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi domestik.

#### **6. Institutionalization of Project Sustainability**

Institutionalization of project sustainability menilai sejauh mana pemberi pinjaman berkomitmen untuk memformalkan proses, praktik, dan hasil proyek dalam kerangka institusional yang mapan, sehingga manfaat proyek dapat dirasakan secara berkelanjutan. Komponen ini penting karena memastikan bahwa proyek

tidak hanya selesai tetapi juga terintegrasi ke dalam sistem yang ada, mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sebagai contoh, pemberi pinjaman dapat membantu membangun Standard Operating Procedures (SOP) yang menjadi panduan resmi untuk pelaksanaan dan pengelolaan proyek, bahkan setelah pendanaan berakhir. Selain itu, pemberi pinjaman dapat mendukung penguatan institusi lokal dengan membantu mendirikan badan pengelola yang khusus menangani aspek operasional proyek untuk memastikan bahwa manfaatnya tetap berlanjut dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan institusionalisasi yang baik, proyek tidak hanya memberikan dampak langsung tetapi juga menciptakan struktur yang memungkinkan penerima proyek untuk mengelola, mereplikasi, atau meningkatkan hasil proyek secara mandiri di masa depan.

## **7. Project Processing Time**

Project processing time mengukur durasi yang diperlukan pemberi pinjaman untuk menyelesaikan keseluruhan siklus pendanaan proyek, mulai dari fase awal (perencanaan, persetujuan, dan pendanaan awal) hingga dukungan pada implementasi dan penyelesaian akhir. Fokusnya adalah pada mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh negara pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan efisien dan tepat waktu.

Komponen ini penting karena pemberi pinjaman dengan mekanisme yang cepat dan efisien, seperti proses persetujuan yang sederhana, prosedur pengadaan yang jelas, dan pencairan dana yang tidak berbelit-belit, dapat mengurangi risiko penundaan yang disebabkan oleh birokrasi yang kompleks. Pemberi pinjaman yang memiliki standar prosedur operasional (SOP) yang baik untuk setiap tahap pembiayaan proyek menunjukkan kapasitas institusional yang kuat, mendukung kelancaran pelaksanaan proyek, dan menciptakan momentum yang berkelanjutan. Misalnya, negara pemberi pinjaman yang mampu memberikan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan proyek atau menyesuaikan jadwal pencairan dana berdasarkan progres proyek menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mendukung keberhasilan proyek. Evaluasi terhadap kecepatan

proses pembiayaan ini membantu pemerintah memastikan bahwa proyek tidak hanya dimulai tepat waktu tetapi juga berjalan lancar hingga penyelesaiannya.

### **C. Ekonomi dan Politik**

Konteks ekonomi dan politik memainkan peran penting dan beragam dalam pengaturan pembiayaan bilateral. Ketika negara-negara terlibat dalam pendanaan bilateral, mereka tidak hanya memberikan atau menerima dukungan pendanaan namun juga menghadapi lanskap ekonomi dan politik yang kompleks. Interaksi ini selalu berdampak pada perumusan, pelaksanaan, dan keberlanjutan proyek yang didanai.

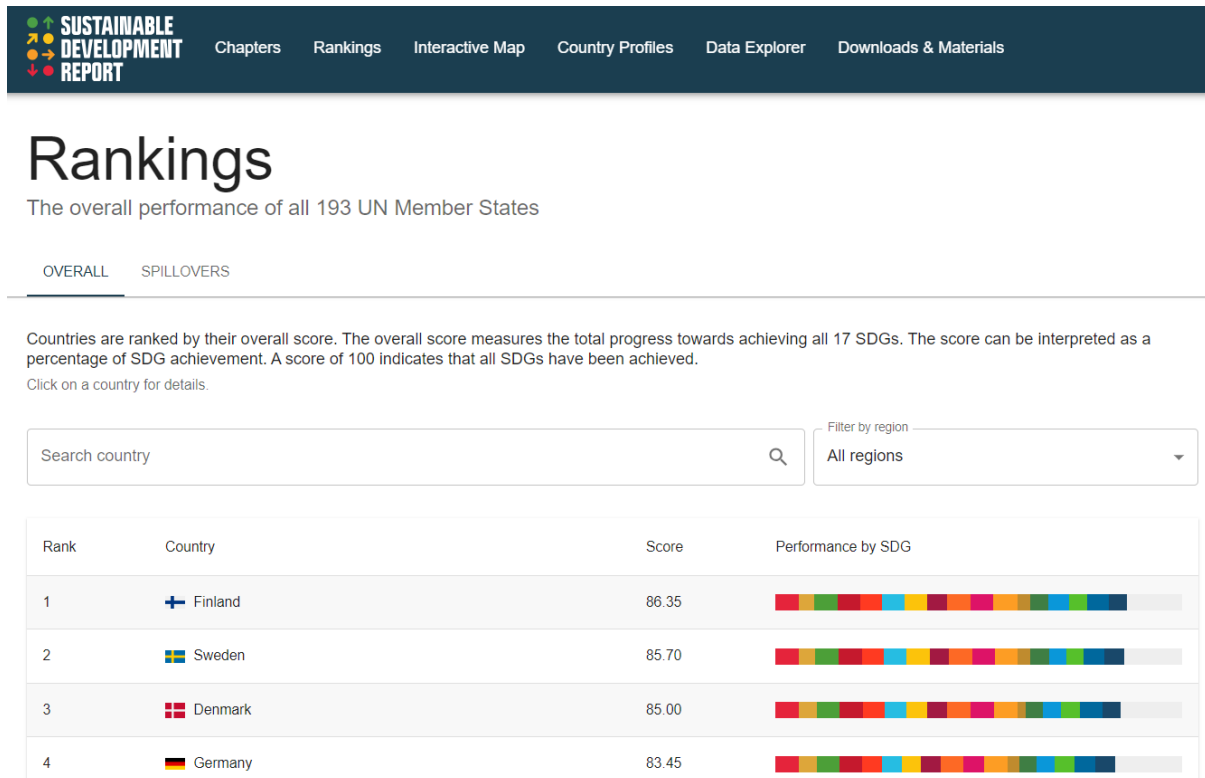
Dimensi politik pendanaan bilateral melibatkan serangkaian keputusan dan keselarasan strategis yang mencerminkan prioritas geopolitik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas baik dari negara pemberi dana maupun penerima. Hal ini mencakup seberapa selaras proyek tersebut dengan tujuan politik dan stabilitas negara-negara peserta, agenda kebijakan luar negerinya, dan dinamika hubungan internasional. Pengelolaan yang efektif terhadap aspek-aspek politik dan ekonomi ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan bagi proyek. Sebagai contoh, kedekatan ekonomi dengan negara pemberi pinjaman tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses pendanaan secara langsung lewat skema pinjaman bilateral, tapi juga berpotensi memobilisasi sumber daya lainnya, seperti investasi dari sektor swasta negara tersebut di masa depan (OECD, 2018).

Selain itu, pertimbangan politik secara langsung mempengaruhi penilaian kelayakan dan risiko suatu proyek. Lingkungan politik yang stabil lebih kondusif bagi keberhasilan implementasi proyek, karena lingkungan tersebut diperkirakan mendukung supremasi hukum, menjaga lingkungan kebijakan yang konsisten, dan memberikan dukungan administratif yang dapat diandalkan. Sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil dapat menimbulkan risiko yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan penundaan proyek, biaya tambahan, atau penghentian dukungan di tengah-tengah proyek.

Komitmen politik negara-negara yang terlibat terhadap norma dan tujuan internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), juga memainkan peran

penting. Komitmen tersebut dapat mendorong agenda dan fokus pendanaan bilateral, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan kesenjangan ekonomi. Komitmen ini sering kali diterjemahkan ke dalam tujuan proyek dan strategi operasional yang dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs negara penerima pinjaman.

**Gambar 5 – Ranking Negara Anggota PBB dalam Pencapaian SDGs (Sachs dkk, 2024)**



## 1. Strategic Diplomatic Relations

Strategic diplomatic relations and economic partnership mengukur kekuatan hubungan diplomatik dan ekonomi antara negara pemberi pinjaman dan penerima. Hubungan ini dapat mencakup perjanjian perdagangan, investasi bilateral, kedekatan geografis, dan intensitas pertukaran diplomatik. Komponen ini penting karena hubungan yang kuat dapat mempermudah koordinasi proyek, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menciptakan sinergi antara kebijakan kedua negara. Selain itu, hubungan diplomatik yang baik juga meningkatkan kepercayaan dan mendukung keberlanjutan proyek, sehingga meminimalkan risiko konflik atau hambatan administratif.

## **2. Commitment to Sustainable Development Goals (SDGs)**

Commitment to Sustainable Development Goals (SDGs) mengevaluasi sejauh mana negara pemberi pinjaman mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs dalam kebijakan dan pendanaannya. Komponen ini penting karena menunjukkan komitmen pemberi pinjaman terhadap pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup. Pendanaan yang selaras dengan SDGs memastikan bahwa proyek tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, memperkuat dampak positif bagi masyarakat, dan meningkatkan reputasi internasional negara penerima.

## **3. Geopolitical Risk and Diplomatic Influence**

Geopolitical risk and diplomatic influence mengukur tingkat stabilitas hubungan internasional negara pemberi pinjaman, termasuk eksposur terhadap gangguan geopolitik atau konflik. Komponen ini penting karena risiko geopolitik yang tinggi dapat memengaruhi keamanan dan kelancaran proyek, serta menambah beban biaya. Sebaliknya, risiko geopolitik yang rendah mencerminkan stabilitas hubungan internasional, aliansi yang kuat, dan lingkungan yang mendukung keberhasilan proyek. Dengan menilai risiko ini, pemerintah dapat memitigasi potensi hambatan yang mungkin muncul selama siklus hidup proyek.

## **4. Political Stability**

Political stability menilai konsistensi negara dalam menjaga stabilitas politik internal, termasuk kemampuan mengelola pemerintahan tanpa gangguan signifikan seperti gejolak sosial atau perubahan kepemimpinan yang drastis. Komponen ini penting karena stabilitas politik menjadi dasar bagi keberhasilan pelaksanaan proyek. Negara dengan tingkat stabilitas politik yang tinggi lebih mampu memberikan dukungan yang konsisten, meminimalkan risiko keterlambatan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan kerja sama bilateral.

#### **D. Hukum dan Peraturan**

Hukum dan peraturan membentuk kerangka penting yang memandu setiap aspek inisiasi, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek dalam pembiayaan bilateral. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum negara-negara yang terlibat dan juga untuk menjaga norma dan praktik dalam hubungan internasional. Pertimbangan hukum dalam pembiayaan bilateral mencakup beragam permasalahan, termasuk komitmen negara terhadap *good corporate governance*, proteksi data, standar lingkungan hidup, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Kerangka hukum ini memiliki banyak tujuan: melindungi kepentingan negara pemberi dana dan penerima, memastikan bahwa proyek berkelanjutan dan dikelola secara etis, serta melindungi terhadap risiko finansial dan operasional. Selain itu, aspek hukum pendanaan bilateral tidak hanya sekedar kepatuhan. Hal ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen proyek, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Selain itu, di dunia yang terglobalisasi saat ini, proyek seringkali mempunyai dampak lingkungan dan sosial yang signifikan yang melampaui batas negara. Oleh karena itu, kerangka hukum seharusnya sejalan dengan undang-undang lingkungan hidup internasional dan standar sosial yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan mendorong praktik pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup peraturan mengenai perlindungan lingkungan hidup, undang-undang ketenagakerjaan, dan standar keterlibatan masyarakat, yang memastikan bahwa proyek memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tuan rumah dan tidak mengarah pada degradasi lingkungan atau kerusuhan sosial.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan memberikan landasan yang stabil bagi proyek-proyek bilateral, sehingga memungkinkan proyek-proyek tersebut berjalan dengan lancar dan pada saat yang sama mendorong dampak positif terhadap pembangunan. Hal ini menjamin seluruh pemangku kepentingan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek sejalan dengan kepentingan nasional

dan standar global, sehingga membuka jalan bagi keberhasilan dan hasil yang saling menguntungkan.

### **1. Data Protection and Privacy**

Data protection and privacy memastikan bahwa semua data pribadi dan keuangan yang terkait dengan proyek pembangunan dikelola secara aman, sah, dan transparan sesuai dengan standar perlindungan data internasional. Komponen ini penting karena proyek pembiayaan bilateral sering melibatkan pertukaran informasi sensitif antar entitas di berbagai yurisdiksi, yang memerlukan kejelasan dan kehati-hatian dalam pengelolaan serta perlindungan data. Dengan penerapan praktik perlindungan data yang memadai, risiko kebocoran informasi atau penyalahgunaan dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Dalam konteks pembiayaan bilateral, perlindungan data menjadi semakin relevan karena banyak proyek melibatkan sistem infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan, di mana pelanggaran data dapat menyebabkan dampak signifikan, termasuk kerugian finansial, hukum, dan reputasi. Sub-kriteria ini mengacu pada kepatuhan terhadap standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan regulasi serupa di tingkat global. Misalnya, proyek yang menangani data warga negara Uni Eropa harus memastikan kepatuhan terhadap GDPR, yang menetapkan aturan ketat untuk pemrosesan data dan memberikan hak signifikan kepada individu. Selain itu, mekanisme perlindungan data yang baik memungkinkan pengelolaan akses, penggunaan, dan transfer informasi sensitif secara lebih terkendali. Hal ini memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat bahwa data yang mereka percayakan dikelola dengan integritas tinggi, mendukung keberhasilan proyek, dan mengurangi potensi risiko yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan proyek.

### **2. Ability to Comply with National Industrial Policy**

Ability to comply with national industrial policy menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman mendukung kebijakan industri nasional Indonesia, seperti

kebijakan kandungan lokal (local content policy). Kebijakan ini mengharuskan persentase tertentu dari tenaga kerja, material, atau sumber daya proyek bersumber dari dalam negeri. Komponen ini penting karena integrasi kebijakan lokal ke dalam proyek dapat merangsang pertumbuhan industri domestik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas pasar dalam negeri. Dukungan terhadap kebijakan ini memastikan bahwa investasi asing selaras dengan strategi industri nasional, memperkuat hubungan bilateral, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang dibiayai. Dengan mendukung kebijakan kandungan lokal, proyek dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas, membina hubungan ekonomi yang lebih kuat, serta meningkatkan keberlanjutan dan penerimaan proyek di tingkat nasional maupun lokal.

### **3. Safeguards Related to Socio-economic, Environmental, and Land Use**

Safeguards terkait sosio-ekonomi, lingkungan, dan penggunaan lahan adalah komponen penting dalam mengelola dan memitigasi risiko yang muncul dari proyek pembangunan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan dapat diminimalkan, sambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Langkah-langkah perlindungan mencakup pencegahan pengungsian paksa, pemberian kompensasi yang adil bagi pihak terdampak, dan perlindungan kawasan ekologi untuk mencegah degradasi lingkungan.

Pendekatan ini juga memastikan bahwa proyek selaras dengan standar nasional dan internasional yang berlaku serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Proyek yang dirancang secara inklusif dan ramah lingkungan tidak hanya melindungi masyarakat yang terkena dampak langsung tetapi juga meningkatkan penerimaan proyek oleh pemangku kepentingan lokal. Dengan perlindungan yang kuat, proyek dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang, memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas, serta mengurangi potensi risiko hukum atau reputasi di masa depan.

#### **4. Legal Framework on Good Corporate Governance**

Legal framework on good corporate governance menilai keberadaan kebijakan hukum yang mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan beretika. Komponen ini penting karena regulasi yang jelas dan mekanisme penegakan hukum memastikan perusahaan menjalankan operasi secara adil, mendukung keputusan berbasis integritas, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik juga meningkatkan kredibilitas proyek di mata investor dan masyarakat.

## 5. KERTAS KERJA PEMBIAYAAN BILATERAL

Tabel 3 menjelaskan kriteria penilaian dalam kertas kerja pembiayaan bilateral yang dikelompokkan ke dalam 4 dimensi.

**Tabel 3 – Kriteria Penilaian dalam Empat Dimensi**

Keuangan	Teknikal	Politik dan Ekonomi	Hukum dan Regulasi
F1 - Cost of debt and lending terms	T1 - Feasibility Studies	P1 - Strategic Diplomatic Relations and Economic Partnership	L1 - Legal Framework on Data Protection and Policy
F2 - Maximum loan amount	T2 – Innovation and Technology Level, and Expertise	P2 - Commitment to Sustainable Development Goals (SDGs)	L2 - Legal Framework on Safeguards Related to Socio-economic, Environmental, and Land Use
F3 - Long-term financial commitment	T3 - Technology Transfer Potential and Comprehensive Expertise Support	P3 - Geopolitical Risk and Diplomatic Influence	L3 - Legal Framework on Good Corporate Governance,
F4 - Transparency and accountability	T4 - Development Assistance Provision	P4 - Political Stability	L4 - Ability to Comply with National Industrial Policy
F5 - Diversification of debt portfolio	T5 - Flexible Conditionality and Support	 Asesmen dapat didasarkan kepada sumber data publik yang tersedia   Asesmen memerlukan <i>expert judgement</i> berdasarkan pengalaman pemangku kepentingan yang pernah terlibat dalam proyek sejenis	
F6 - Currency stability	T6 – Project Initiation and Implementation Processing Time		
	T7 - Institutionalization of Project		

## 5.1 KRITERIA DALAM DIMENSI KEUANGAN

### F1. Cost of debt and lending terms

#### Definisi

Metrik keuangan yang mewakili tingkat efektivitas biaya yang dikeluarkan proyek atas dana pinjaman dari pihak pemberi pinjaman. Biaya ini secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk suku bunga, grace period, dan jangka waktu pinjaman secara keseluruhan.

#### Skala Penilaian

1. Sangat Tidak Menguntungkan: Syarat sangat tidak mendukung dengan suku bunga yang sangat tinggi dan jadwal pembayaran yang kaku.
2. Tidak Menguntungkan: Syarat tidak mendukung, dengan suku bunga lebih tinggi dari rata-rata dan ketentuan yang ketat.
3. Cukup Adil: Syarat cukup adil dengan suku bunga sesuai rata-rata industri dan jadwal pembayaran standar.
4. Menguntungkan: Syarat mendukung dengan suku bunga kompetitif dan jadwal pembayaran yang fleksibel.
5. Sangat Menguntungkan: Syarat luar biasa mendukung dengan suku bunga sangat rendah serta jadwal pembayaran yang sangat fleksibel dan mudah diakomodasi.

#### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penilaian ini dapat berasal dari dua pendekatan. Pertama, *prospective*, yaitu data terkait *term and condition* yang ditawarkan oleh negara potensial pemberi pinjaman untuk proyek yang akan datang. Kedua, *retrospective*, yaitu data historis yang dimiliki oleh Kementerian Bappenas mengenai profil negara pemberi pinjaman berdasarkan pengalaman mereka dalam membiayai proyek-proyek sebelumnya. Kedua pendekatan ini memberikan perspektif yang komplementer untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif dan informatif.

## **F2. Maximum loan amount**

### **Definisi**

Jumlah (potensi) pinjaman maksimum yang dapat diberikan oleh pemberi pinjaman, proporsional terhadap nilai proyek. Komponen ini menilai sejauh mana pendanaan yang ditawarkan memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Jumlah pinjaman jauh di bawah kebutuhan, hanya mencakup kurang dari 25% dari total biaya proyek.
2. Rendah: Jumlah pinjaman mencakup 25%-50% dari biaya proyek, sedikit di bawah kebutuhan ideal.
3. Cukup: Jumlah pinjaman memadai, mencakup sekitar 51%-75% dari biaya proyek.
4. Tinggi: Jumlah pinjaman mencakup 76%-90% dari kebutuhan proyek, hampir mendekati kebutuhan penuh.
5. Sangat Tinggi: Jumlah pinjaman maksimal, mencakup 90%-100% atau lebih dari total biaya proyek.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Maximum Loan Amount dapat dilakukan melalui:

- *Prospective*: Data penawaran pinjaman maksimum yang diberikan oleh negara pemberi pinjaman untuk proyek mendatang.
- *Retrospective*: Data historis mengenai jumlah pinjaman maksimum yang pernah diterima dari negara pemberi pinjaman pada proyek-proyek sebelumnya.

### **F3. Long-term financial commitment**

#### **Definisi**

Kemauan dan kemampuan pemberi pinjaman untuk memberikan dukungan jangka panjang yang diperlukan untuk keberhasilan proyek, terutama untuk proyek infrastruktur atau pembangunan berskala besar yang memiliki siklus hidup panjang.

#### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Fokus hanya pada jangka pendek, tanpa dukungan yang melampaui kebutuhan langsung proyek.
2. Rendah: Komitmen jangka panjang terbatas, dengan dukungan hanya pada jangka pendek hingga menengah.
3. Sedang: Komitmen jangka panjang moderat, yang cukup sejalan dengan durasi proyek.
4. Tinggi: Komitmen jangka panjang kuat, mencakup sebagian besar siklus hidup proyek.
5. Sangat Tinggi: Komitmen penuh untuk jangka panjang, termasuk dukungan komprehensif yang melampaui siklus hidup proyek.

#### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Long-term Financial Commitment dilakukan berdasarkan:

- Prospective: Informasi mengenai komitmen jangka panjang yang dijanjikan oleh negara pemberi pinjaman dalam proyek yang direncanakan.
- Retrospective: Analisis data historis terkait tingkat dukungan jangka panjang yang diberikan oleh pemberi pinjaman pada proyek-proyek sebelumnya.

## **F4. Transparency and accountability**

### **Definisi**

Transparansi dan akuntabilitas dalam skema pinjaman mencakup pelaporan yang jelas, pengungkapan informasi keuangan yang lengkap, kepatuhan terhadap persyaratan pinjaman, serta penerapan praktik tata kelola yang baik. Komponen ini menilai sejauh mana pemberi pinjaman menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Transparansi dan akuntabilitas sangat rendah, dengan pelaporan keuangan yang tidak jelas atau menyesatkan.
2. Rendah: Transparansi terbatas, dengan kekurangan dalam akuntabilitas atau pelaporan yang tidak konsisten.
3. Sedang: Transparansi cukup, dengan pelaporan yang teratur dan praktik manajemen yang bertanggung jawab.
4. Tinggi: Transparansi dan akuntabilitas tinggi, dengan pelaporan keuangan yang konsisten dan jelas.
5. Sangat Tinggi: Transparansi dan akuntabilitas luar biasa, dengan pengungkapan informasi yang proaktif, terperinci, dan konsisten.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Transparency and Accountability dapat dilakukan berdasarkan:

- Prospective: Analisis kebijakan pelaporan dan pengungkapan informasi yang dijanjikan oleh pemberi pinjaman dalam proyek mendatang.
- Retrospective: Evaluasi data historis dari pelaporan keuangan dan praktik tata kelola pemberi pinjaman pada proyek sebelumnya, termasuk rekam jejak dalam mematuhi standar internasional.

## **F5. Diversification of debt portfolio**

### **Definisi**

Mengacu pada strategi Indonesia untuk menyebarkan utang ke berbagai instrumen, pemberi pinjaman, mata uang, dan jatuh tempo guna mengurangi risiko keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memitigasi risiko volatilitas pasar, perubahan kondisi ekonomi global, dan risiko politik, serta untuk mengoptimalkan struktur utang demi stabilitas keuangan jangka panjang.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Tidak Diversifikasi: Pinjaman berasal dari negara yang memiliki rasio utang sangat tinggi terhadap Indonesia, menunjukkan ketergantungan yang signifikan.
2. Tidak Diversifikasi: Pinjaman berasal dari negara yang sering menjadi sumber utama pendanaan dengan rasio utang yang masih dominan.
3. Diversifikasi Sedang: Pinjaman berasal dari negara yang memiliki rasio utang moderat terhadap Indonesia.
4. Diversifikasi Tinggi: Pinjaman berasal dari negara yang relatif baru memberikan pendanaan dengan rasio utang yang rendah.
5. Diversifikasi Sangat Tinggi: Pinjaman berasal dari negara yang sebelumnya tidak pernah memberikan pinjaman kepada Indonesia, menunjukkan inovasi dalam diversifikasi sumber pendanaan.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Diversification of Debt Portfolio dilakukan secara retrospective, menggunakan data historis dari:

- Kementerian Keuangan: Data sumber utang secara umum dan distribusinya.
- Kementerian PPN/Bappenas: Data khusus terkait portofolio utang bilateral dan proyek-proyek pembangunan yang didanai.

## **F6. Currency stability**

### **Definisi**

Mengacu pada tingkat stabilitas nilai tukar mata uang pemberi pinjaman, yang memengaruhi jumlah pembayaran kembali dalam mata uang asal. Stabilitas ini penting untuk meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar, yang dapat berdampak pada biaya pinjaman dan keberlanjutan proyek. Penilaian fokus pada data historis stabilitas kurs selama periode tertentu, seperti satu tahun terakhir, untuk mengevaluasi risiko volatilitas.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Tidak Stabil: Volatilitas tinggi dengan fluktuasi besar yang signifikan, menyebabkan biaya tidak dapat diprediksi.
2. Tidak Stabil: Volatilitas moderat dengan fluktuasi sering yang dapat memengaruhi pembayaran.
3. Stabil Sedang: Stabilitas rata-rata, dengan fluktuasi yang dapat dikelola namun tetap memberikan risiko.
4. Stabil: Stabilitas tinggi, dengan fluktuasi yang jarang dan dapat diprediksi.
5. Sangat Stabil: Hampir tidak ada fluktuasi, memastikan prediktabilitas biaya pembayaran.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Currency Stability difokuskan pada pendekatan retrospective, menggunakan data historis yang tersedia secara publik untuk mengevaluasi stabilitas nilai tukar mata uang pemberi pinjaman. Contohnya adalah data dari **Trading Economics**, yang memberikan informasi tentang fluktuasi kurs selama satu tahun terakhir. Data ini memungkinkan pemerintah untuk mengukur potensi risiko keuangan yang dihadapi akibat volatilitas kurs dari pemberi pinjaman.

## **5.2 KRITERIA DALAM DIMENSI TEKNIKAL**

### **T1 - Feasibility Studies**

#### **Definisi**

Menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman mampu menyediakan dokumen evaluasi kelayakan yang berkualitas untuk proyek yang didanai. Penilaian mencakup aspek teknis, ekonomi, hukum, dan penjadwalan, sekaligus mempertimbangkan rekam jejak negara tersebut dalam menyusun dokumen kelayakan pada proyek sebelumnya.

#### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Negara pemberi pinjaman tidak memiliki kebiasaan atau kapasitas untuk menyusun dokumen kelayakan proyek, dokumen yang disediakan tidak lengkap atau tidak relevan.
2. Rendah: Negara pemberi pinjaman jarang menyusun dokumen kelayakan, dan dokumen yang disediakan hanya mencakup beberapa aspek dengan kualitas rendah.
3. Sedang: Negara pemberi pinjaman memiliki pengalaman moderat dalam menyediakan dokumen kelayakan, dengan cakupan yang cukup tetapi kurang mendalam.
4. Tinggi: Negara pemberi pinjaman terbiasa menyusun dokumen kelayakan yang lengkap dan relevan, mencakup semua aspek penting dengan kualitas tinggi.
5. Sangat Tinggi: Negara pemberi pinjaman secara konsisten menyusun dokumen kelayakan yang sangat detail, menyeluruh, dan mendukung pengambilan keputusan strategis, berdasarkan rekam jejak yang kuat.

#### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Feasibility Studies dilakukan berdasarkan:

- Prospective: Kualitas dokumen kelayakan yang disediakan oleh negara pemberi pinjaman untuk proyek yang diusulkan.
- Retrospective: Rekam jejak historis terkait penyediaan dokumen kelayakan oleh negara pemberi pinjaman pada proyek sebelumnya.

## **T2 - Innovation and Expertise Level**

### **Definisi**

Menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman memiliki tingkat inovasi dan kepakaran yang relevan dengan proyek spesifik yang didanai. Penilaian ini berfokus pada kemampuan negara pemberi pinjaman untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan teknologi terkini yang mendukung keberhasilan proyek, serta tingkat kepakaran mereka dalam bidang yang relevan.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Negara pemberi pinjaman memiliki tingkat inovasi dan kepakaran yang sangat terbatas, dengan indikator global menunjukkan posisi rendah.
2. Rendah: Tingkat inovasi rendah, dengan kontribusi teknologi atau publikasi ilmiah yang minim di bidang terkait.
3. Sedang: Tingkat inovasi moderat, dengan kehadiran teknologi dan keahlian yang cukup untuk mendukung proyek.
4. Tinggi: Tingkat inovasi tinggi, didukung oleh data paten, publikasi ilmiah, atau peringkat global yang menunjukkan kontribusi signifikan.
5. Sangat Tinggi: Negara pemberi pinjaman menunjukkan tingkat inovasi luar biasa dengan kontribusi teknologi mutakhir, banyaknya publikasi ilmiah, dan jumlah pakar yang sangat tinggi di bidang terkait.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Innovation and Expertise Level difokuskan pada pendekatan retrospective, menggunakan data publik yang tersedia secara global, seperti:

- Tingkat Inovasi: Diukur melalui Global Innovation Index, yang mencerminkan kemampuan inovasi secara umum di negara pemberi pinjaman.
- Teknologi Spesifik: Diukur melalui data paten yang terdaftar pada World Intellectual Property Organization (WIPO) atau sumber serupa.
- Kepakaran: Diukur melalui jumlah publikasi ilmiah atau jumlah profesor dan pakar di bidang spesifik yang relevan, yang dapat diperoleh dari sumber data akademik atau lembaga riset internasional.

### **T3 - Technology Transfer Potential and Comprehensive Expertise Support**

#### **Definisi**

Menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman mampu memfasilitasi pertukaran teknologi dan memberikan dukungan keahlian untuk mendukung keberhasilan proyek. Penilaian ini mencakup kemampuan pemberi pinjaman untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek, sekaligus membangun kapasitas lokal guna mendukung keberlanjutan jangka panjang.

#### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Tidak ada upaya untuk transfer teknologi, dan dukungan keahlian sangat terbatas atau tidak ada.
2. Rendah: Upaya transfer teknologi terbatas, dengan dukungan keahlian yang minim dan kurang relevan untuk membangun kapasitas lokal.
3. Sedang: Transfer teknologi moderat, dengan dukungan keahlian yang cukup untuk membantu implementasi proyek tetapi belum signifikan dalam membangun kapasitas lokal.
4. Tinggi: Transfer teknologi yang kuat dengan dukungan keahlian komprehensif yang relevan, memberikan manfaat besar bagi proyek dan kapasitas lokal.
5. Sangat Tinggi: Transfer teknologi luar biasa, didukung oleh pelatihan mendalam, pengembangan kapasitas lokal, dan komitmen penuh untuk membangun keberlanjutan jangka panjang.

#### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Technology Transfer Potential and Comprehensive Expertise Support dilakukan melalui:

- Retrospective: Data historis tentang rekam jejak negara pemberi pinjaman dalam melakukan transfer teknologi dan memberikan dukungan keahlian pada proyek-proyek sebelumnya.
- Prospective: Informasi mengenai rencana atau komitmen transfer teknologi dan dukungan keahlian yang dijanjikan oleh negara pemberi pinjaman dalam proyek yang sedang direncanakan. Data ini dapat mencakup proposal proyek, perjanjian kerja sama, atau diskusi awal antara pihak terkait.

### **T4 - Development Assistance Provision**

---

## **Definisi**

Menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman mampu menyediakan berbagai bentuk bantuan pembangunan untuk mendukung keberhasilan proyek. Bantuan ini dapat berupa dukungan teknis, keuangan, pembangunan ekosistem pendukung, atau pengembangan infrastruktur yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan proyek.

## **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Tidak ada bantuan pembangunan, atau dukungan yang diberikan sangat terbatas dan tidak relevan dengan kebutuhan proyek.
2. Rendah: Bantuan pembangunan yang diberikan terbatas pada beberapa aspek teknis atau keuangan, dengan dampak minimal pada keberhasilan proyek.
3. Sedang: Bantuan pembangunan cukup lengkap, mencakup aspek teknis dan keuangan dengan kontribusi yang moderat terhadap keberhasilan proyek.
4. Tinggi: Bantuan pembangunan komprehensif, mencakup dukungan teknis, keuangan, ekosistem, atau infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan proyek.
5. Sangat Tinggi: Bantuan pembangunan luar biasa lengkap dan terkoordinasi, mencakup semua aspek pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan proyek dan memberikan dampak signifikan terhadap tujuan pembangunan.

## **Sumber Data**

Penilaian terhadap Development Assistance Provision dilakukan melalui:

- Retrospective: Analisis rekam jejak negara pemberi pinjaman dalam menyediakan bantuan pembangunan pada proyek-proyek sebelumnya, yang dapat diakses melalui laporan pembangunan, studi evaluasi proyek, atau data historis lainnya.
- Prospective: Informasi terkait komitmen negara pemberi pinjaman dalam memberikan bantuan pembangunan untuk proyek yang sedang direncanakan, seperti yang tercantum dalam proposal proyek, dokumen kerja sama, atau perjanjian awal.

## **T5 - Flexible Conditionality and Support**

### **Definisi**

---

Menilai sejauh mana pemberi pinjaman memberikan perjanjian pembiayaan yang fleksibel, tanpa memberlakukan persyaratan kaku seperti kewajiban menggunakan vendor, tenaga kerja, atau sumber daya dari negara pemberi pinjaman. Komponen ini berfokus pada kemampuan pembiayaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan proyek dan mendukung penguatan kapasitas lokal di negara penerima.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Tidak Fleksibel: Persyaratan pembiayaan sangat kaku, mewajibkan penggunaan vendor, tenaga kerja, atau sumber daya hanya dari negara pemberi pinjaman.
2. Tidak Fleksibel: Persyaratan cukup ketat, dengan batasan signifikan terkait penggunaan vendor atau sumber daya lokal.
3. Sedang: Persyaratan pembiayaan moderat, memungkinkan beberapa fleksibilitas tetapi masih terdapat batasan tertentu pada penggunaan sumber daya lokal.
4. Fleksibel: Persyaratan cukup fleksibel, memberikan kebebasan signifikan dalam penggunaan vendor, tenaga kerja, dan sumber daya lokal.
5. Sangat Fleksibel: Persyaratan pembiayaan sangat fleksibel, sepenuhnya mendukung penggunaan vendor, tenaga kerja, dan sumber daya lokal tanpa pembatasan.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Flexible Conditionality and Support dilakukan melalui:

- Retrospective: Analisis rekam jejak negara pemberi pinjaman dalam menerapkan persyaratan fleksibel pada proyek sebelumnya. Data ini dapat diperoleh dari laporan proyek, evaluasi dampak, atau dokumen kerja sama yang ada.
- Prospective: Informasi terkait persyaratan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi pinjaman untuk proyek yang direncanakan, termasuk kebijakan mereka tentang penggunaan sumber daya lokal dan adaptasi terhadap kebutuhan proyek.

### **T6 - Project Processing Time**

#### **Definisi**

---

Project processing time mengukur durasi yang diperlukan oleh pemberi pinjaman untuk menyelesaikan keseluruhan siklus pendanaan proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan, pencairan dana, hingga dukungan pada implementasi dan penyelesaian akhir. Penilaian ini berfokus pada efisiensi mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh negara pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan tepat waktu dan tanpa hambatan yang tidak perlu.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Lambat: Proses pendanaan sangat lambat dengan birokrasi yang rumit, menyebabkan penundaan signifikan pada proyek.
2. Lambat: Proses pendanaan memiliki beberapa kendala administratif, dengan durasi lebih lama dari rata-rata.
3. Sedang: Proses pendanaan berjalan dalam waktu yang wajar, dengan beberapa efisiensi tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan.
4. Cepat: Proses pendanaan cukup cepat, dengan mekanisme yang efisien dan kendala yang minimal.
5. Sangat Cepat: Proses pendanaan sangat cepat dan efisien, dengan mekanisme yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan proyek.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Project Processing Time dilakukan melalui:

- Retrospective: Data historis mengenai kecepatan proses pendanaan oleh negara pemberi pinjaman pada proyek-proyek sebelumnya, mencakup durasi dari fase awal hingga penyelesaian pendanaan.
- Prospective: Informasi yang disediakan oleh pemberi pinjaman tentang mekanisme pendanaan yang diusulkan untuk proyek mendatang, termasuk estimasi waktu untuk setiap tahap proses.

## **T7 - Institutionalization of Project**

### **Definisi**

Mengukur sejauh mana pemberi pinjaman berkomitmen untuk memformalkan proses, praktik, dan hasil proyek dalam kerangka institusional yang mapan. Penilaian ini berfokus pada upaya untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang, dengan dampak yang tetap bertahan bahkan setelah tahap pendanaan awal selesai.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Tidak ada upaya untuk memformalkan proses atau hasil proyek ke dalam sistem institusi, dengan risiko keberlanjutan yang tinggi.
2. Rendah: Upaya institusionalisasi terbatas, dengan dokumentasi atau struktur yang kurang jelas untuk mendukung keberlanjutan proyek.
3. Sedang: Upaya institusionalisasi cukup, dengan beberapa proses dan praktik yang terintegrasi dalam sistem, tetapi belum menyeluruh.
4. Tinggi: Upaya institusionalisasi yang kuat, dengan proses dan praktik proyek yang terintegrasi secara signifikan dalam kerangka institusional.
5. Sangat Tinggi: Komitmen penuh untuk institusionalisasi, dengan semua hasil dan praktik proyek diintegrasikan secara formal ke dalam sistem institusional untuk keberlanjutan jangka panjang.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Institutionalization of Project dilakukan melalui:

- Retrospective: Data historis mengenai tingkat keberhasilan pemberi pinjaman dalam memformalisasi dan menginstitusionalisasikan proyek-proyek sebelumnya.
- Prospective: Rencana institusionalisasi yang diajukan oleh pemberi pinjaman untuk proyek mendatang, mencakup mekanisme formal dan strategi keberlanjutan yang diusulkan.

## 5.3 KRITERIA DALAM DIMENSI POLITIK DAN EKONOMI

### P1. Strategic Diplomatic Relations and Economic Partnership

#### Definisi

Menilai kekuatan hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan negara pemberi pinjaman, yang dapat menjadi faktor penentu kelancaran pelaksanaan proyek di masa depan.

#### Skala Penilaian

1. Sangat Lemah: Tidak ada hubungan diplomatik atau ekonomi yang signifikan, tanpa perjanjian FTA, dan volume perdagangan sangat rendah.
2. Lemah: Hubungan diplomatik dan ekonomi terbatas, dengan kerja sama perdagangan kecil dan tanpa dukungan perjanjian strategis.
3. Sedang: Hubungan diplomatik yang cukup baik, dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang sedang berkembang dan volume perdagangan moderat.
4. Kuat: Hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat, dengan perjanjian FTA aktif, hubungan strategis, dan volume perdagangan yang besar.
5. Sangat Kuat: Hubungan yang sangat erat, mencakup kerja sama strategis komprehensif, perjanjian perdagangan utama (FTA), dan volume perdagangan yang sangat tinggi.

#### Sumber Data

Penilaian terhadap Strategic Diplomatic Relations and Economic Partnership menggunakan pendekatan retrospective, dengan data yang dapat diperoleh dari:

- **Kementerian Perdagangan:** Informasi terkait **volume perdagangan**, keberadaan **perjanjian FTA**, dan **aliran investasi bilateral**.
- **Kementerian Luar Negeri:** Data mengenai **status hubungan diplomatik strategis** dan **rekam jejak kerja sama bilateral**.

## **P2. Commitment to Sustainable Development Goals (SDGs)**

### **Definisi**

Mengevaluasi sejauh mana negara pemberi pinjaman berkomitmen terhadap pencapaian SDGs, termasuk integrasi tujuan-tujuan ini ke dalam kerangka kebijakan nasional dan internasional serta alokasi sumber daya untuk mendukung target-target pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini menunjukkan tingkat kepedulian politik dan ekonomi negara terhadap keberlanjutan global.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap SDGs, dengan peringkat global SDGs yang sangat rendah.
2. Rendah: Komitmen terhadap SDGs terbatas, dengan sedikit kebijakan atau inisiatif yang relevan, dan peringkat global SDGs yang rendah.
3. Sedang: Komitmen terhadap SDGs cukup, tercermin dalam beberapa kebijakan nasional dan peringkat global SDGs yang moderat.
4. Tinggi: Komitmen yang signifikan terhadap SDGs, dengan integrasi tujuan SDGs dalam kebijakan nasional, dan peringkat global SDGs yang baik.
5. Sangat Tinggi: Komitmen luar biasa terhadap SDGs, dengan implementasi menyeluruh di berbagai sektor, alokasi sumber daya yang besar, dan peringkat global SDGs yang sangat tinggi.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Commitment to Sustainable Development Goals (SDGs) dilakukan melalui pendekatan retrospective, menggunakan:

- **Ranking Global SDGs:** Informasi dari laporan global seperti **SDG Index** untuk menilai posisi negara pemberi pinjaman dalam pencapaian SDGs.
- **Kebijakan dan Inisiatif SDGs:** Data dari sumber publik mengenai kebijakan, program, atau alokasi sumber daya terkait SDGs oleh negara pemberi pinjaman.

### **P3. Geopolitical Risk and Diplomatic Influence**

#### **Definisi**

Mengacu pada tingkat stabilitas hubungan internasional suatu negara, yang mencakup paparan terhadap gangguan atau konflik potensial yang dapat memengaruhi keamanan dan pembayaran pinjaman. Stabilitas geopolitik yang tinggi menunjukkan hubungan diplomatik yang kuat, aliansi strategis yang mapan, serta minimnya keterlibatan negara dalam konflik internasional, sehingga mengurangi risiko yang dapat memengaruhi kelancaran proyek.

#### **Skala Penilaian**

1. Sangat Tinggi: Negara memiliki risiko geopolitik yang sangat tinggi dengan paparan konflik yang signifikan, aliansi diplomatik yang lemah, dan hubungan yang tegang dengan banyak negara.
2. Tinggi: Risiko geopolitik moderat, dengan beberapa keterlibatan dalam konflik atau hubungan diplomatik yang kurang stabil.
3. Sedang: Risiko geopolitik rata-rata, dengan hubungan diplomatik yang cukup baik tetapi masih terdapat beberapa potensi risiko.
4. Rendah: Risiko geopolitik rendah, dengan aliansi strategis yang kuat, hubungan diplomatik yang stabil, dan keterlibatan minimal dalam konflik.
5. Sangat Rendah: Negara sangat stabil secara geopolitik, memiliki pengaruh diplomatik yang besar, hubungan strategis yang kuat, dan hampir tidak ada paparan konflik internasional.

#### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Geopolitical Risk and Diplomatic Influence dilakukan melalui pendekatan retrospective, menggunakan data publik yang tersedia, seperti:

- Global Diplomacy Index: Data yang dirilis oleh Lowy Institute, mengukur kekuatan dan jangkauan hubungan diplomatik suatu negara melalui jumlah kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan diplomatik lainnya.
  - Global Peace Index (GPI): Indeks yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP), yang menilai tingkat perdamaian suatu negara berdasarkan indikator-indikator seperti tingkat konflik domestik dan internasional, stabilitas politik, serta tingkat keamanan masyarakat.
-

- Data Hubungan Diplomatik: Informasi mengenai partisipasi negara dalam aliansi internasional seperti ASEAN, G20, dan kemitraan strategis bilateral yang relevan, yang menunjukkan tingkat pengaruh diplomatik dan keterlibatan internasional.

#### **P4. Political Stability**

##### **Definisi**

Political stability mengukur sejauh mana suatu negara mampu menjaga stabilitas politik internalnya secara konsisten, bebas dari gejolak, konflik, atau perubahan kepemimpinan yang drastis yang dapat mengganggu kelancaran kerja sama bilateral dan pelaksanaan proyek.

##### **Skala Penilaian**

1. Sangat Tidak Stabil: Negara sering mengalami gejolak politik, perubahan kepemimpinan yang drastis, atau konflik yang signifikan.
2. Tidak Stabil: Terdapat ketidakstabilan politik yang moderat, dengan insiden konflik atau gangguan sesekali.
3. Stabil Sedang: Stabilitas politik cukup baik, tetapi masih ada risiko gejolak atau perubahan yang dapat memengaruhi proyek.
4. Stabil: Stabilitas politik tinggi, dengan pemerintahan yang konsisten dan risiko politik yang rendah.
5. Sangat Stabil: Negara memiliki stabilitas politik yang luar biasa, dengan tata kelola yang solid dan hampir tidak ada risiko gejolak.

##### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Political Stability dilakukan melalui pendekatan retrospective, menggunakan data publik yang tersedia, seperti **Political Stability and Absence of Violence/Terrorism Indicator**, Indikator yang dirilis oleh World Governance Indicators (WGI) untuk menilai stabilitas politik dan keamanan suatu negara.

## **5.4 KRITERIA DALAM DIMENSI HUKUM DAN PERATURAN**

### **L1. Data Protection and Policy**

#### **Definisi**

Menilai bagaimana negara pemberi pinjaman mengelola data pribadi secara aman, sah, dan transparan. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana kebijakan dan praktik perlindungan data negara tersebut selaras dengan standar internasional. Dalam konteks pembiayaan bilateral, perlindungan data sangat penting karena melibatkan pertukaran informasi sensitif antar entitas di yurisdiksi yang berbeda, yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan sesuai regulasi.

#### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Negara memiliki kebijakan perlindungan data yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali, dengan risiko pelanggaran data yang sangat tinggi.
2. Rendah: Kebijakan perlindungan data ada tetapi tidak lengkap, dengan tingkat kepatuhan rendah terhadap standar internasional.
3. Sedang: Negara memiliki kebijakan perlindungan data yang moderat, dengan sebagian besar elemen dasar standar internasional telah diadopsi.
4. Tinggi: Negara memiliki kebijakan perlindungan data yang kuat, dengan kepatuhan yang baik terhadap standar internasional dan mekanisme perlindungan yang efektif.
5. Sangat Tinggi: Negara memiliki kebijakan perlindungan data yang sangat maju, dengan penerapan yang komprehensif, kepatuhan penuh terhadap standar internasional, dan pengawasan ketat.

#### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Data Protection and Policy dilakukan melalui pendekatan retrospective, menggunakan data publik yang tersedia, seperti:

- Ranking DLA Piper Data Protection: Indeks global yang mengukur tingkat kepatuhan negara terhadap kebijakan perlindungan data internasional.

- Global Data Protection Index: Laporan dari penyedia layanan keamanan data atau lembaga riset yang mengevaluasi kebijakan dan implementasi perlindungan data secara global.

## **L2. Safeguards Related to Socio-economic, Environmental, and Land Use**

### **Definisi**

Menilai bagaimana negara pemberi pinjaman menerapkan perlindungan untuk mengelola dan memitigasi risiko sosio-ekonomi dan lingkungan dalam proyek pembangunan. Penilaian ini mencakup upaya negara pemberi pinjaman dalam memastikan bahwa dampak negatif terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan alam dapat diminimalkan melalui kebijakan dan praktik yang sesuai dengan standar internasional.

### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Negara tidak memiliki kebijakan perlindungan yang jelas atau implementasi yang memadai, dengan risiko tinggi terhadap dampak buruk proyek.
2. Rendah: Kebijakan perlindungan terbatas, dengan implementasi yang minim dan kurang efektif dalam mengurangi dampak proyek.
3. Sedang: Kebijakan perlindungan moderat, mencakup langkah-langkah dasar untuk mengurangi risiko dampak sosio-ekonomi dan lingkungan.
4. Tinggi: Negara memiliki kebijakan perlindungan yang kuat, dengan implementasi yang efektif untuk mengelola dampak proyek.
5. Sangat Tinggi: Kebijakan perlindungan luar biasa komprehensif, dengan implementasi yang sangat baik dan selaras dengan standar internasional, serta berfokus pada keberlanjutan jangka panjang.

### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Safeguards Related to Socio-economic, Environmental, and Land Use dilakukan melalui pendekatan retrospective, menggunakan data publik yang tersedia, seperti:

- **Environment Stringency Index (OECD):** Mengukur sejauh mana negara memiliki kebijakan lingkungan yang ketat dan mendukung keberlanjutan.

- **Environmental Performance Index (EPI):** Indeks global yang menilai kinerja lingkungan negara berdasarkan berbagai indikator seperti kebijakan perlindungan ekosistem, kualitas udara, dan pengelolaan sumber daya.

### **L3. Legal Framework on Good Corporate Governance**

#### **Definisi**

Legal framework on good corporate governance menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman memiliki kebijakan hukum yang mendukung praktik tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan beretika. Penilaian ini mencakup keberadaan regulasi serta mekanisme penegakan hukum yang memastikan perusahaan menjalankan operasinya secara adil dan sesuai dengan standar internasional, sehingga meminimalkan risiko terkait korupsi, konflik kepentingan, dan pelanggaran etika.

#### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Negara memiliki kerangka hukum yang sangat terbatas, dengan mekanisme penegakan yang lemah dan risiko tata kelola yang tinggi.
2. Rendah: Kerangka hukum ada tetapi tidak lengkap, dengan regulasi yang minim dan implementasi yang kurang efektif.
3. Sedang: Kerangka hukum cukup lengkap, dengan regulasi dasar dan mekanisme penegakan yang moderat.
4. Tinggi: Kerangka hukum kuat, dengan regulasi yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan penegakan hukum yang efektif.
5. Sangat Tinggi: Kerangka hukum luar biasa komprehensif, dengan regulasi yang sangat mendukung, implementasi yang konsisten, dan penegakan hukum yang kuat sesuai standar internasional.

#### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Legal Framework on Good Corporate Governance dilakukan melalui pendekatan retrospective, menggunakan data publik seperti:

- World Governance Indicators (WGI): Menyediakan data mengenai tata kelola negara, termasuk efektivitas pemerintah dan penegakan hukum.

- Notredame Country Index: Menilai kerangka hukum dan kebijakan tata kelola di berbagai negara, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.
- Global Competitiveness Report (World Economic Forum): Laporan yang mencakup indikator tata kelola perusahaan, kualitas institusi hukum, dan penegakan peraturan di berbagai negara.

#### **L4. Ability to Comply with National Industrial Policy**

##### **Definisi**

Ability to comply with national industrial policy menilai sejauh mana negara pemberi pinjaman mendukung kebijakan industri nasional Indonesia, termasuk keselarasan proyek dengan prioritas lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

##### **Skala Penilaian**

1. Sangat Rendah: Tidak ada dukungan terhadap kebijakan industri nasional, dengan proyek sepenuhnya tidak selaras dengan prioritas lokal.
2. Rendah: Dukungan terbatas terhadap kebijakan industri nasional, dengan sedikit integrasi prioritas lokal dalam proyek.
3. Sedang: Dukungan moderat terhadap kebijakan industri nasional, dengan beberapa elemen lokal diintegrasikan ke dalam proyek.
4. Tinggi: Dukungan yang signifikan terhadap kebijakan industri nasional, dengan integrasi yang kuat terhadap prioritas lokal.
5. Sangat Tinggi: Dukungan penuh terhadap kebijakan industri nasional, dengan proyek sepenuhnya sejalan dan mendukung prioritas lokal.

##### **Sumber Data**

Penilaian terhadap Ability to Comply with National Industrial Policy dilakukan melalui pendekatan:

- Retrospective: Rekam jejak pemberi pinjaman dalam mendukung kebijakan industri nasional pada proyek-proyek sebelumnya. Data dapat diperoleh dari laporan evaluasi proyek, dokumen kerja sama bilateral, atau data dari kementerian terkait.

- Prospective: Informasi dari proposal proyek atau perjanjian pendanaan mengenai komitmen negara pemberi pinjaman untuk mendukung kebijakan industri nasional, termasuk integrasi tenaga kerja lokal, material, atau komponen industri lainnya.

## 6. PROSES PEMBOBOTAN MELALUI METODE *AHP*

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode pengambilan keputusan berbasis multi-kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot prioritas berbagai kriteria dan sub-kriteria dalam suatu kerangka evaluasi. AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk membandingkan elemen-elemen secara berpasangan berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap tujuan utama. Melalui proses ini, AHP memberikan hasil berupa bobot terkuantifikasi yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing elemen dalam hierarki keputusan. Dalam konteks kertas kerja ini, AHP digunakan untuk memberikan bobot pada empat dimensi utama (Keuangan, Teknis, Ekonomi dan Politik, serta Hukum dan Regulasi) dan masing-masing komponen sub-kriterianya, sehingga menghasilkan penilaian yang terstruktur dan objektif.

Sebagai bagian dari proses AHP pengembangan kerangka kerja penilaian pembiayaan bilateral, Focus Group Discussion (FGD) diadakan sebanyak dua kali dengan tujuan untuk menentukan bobot prioritas dari dimensi dan sub-kriteria menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) tersebut. FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga yang relevan dengan pengelolaan dan perencanaan proyek pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan bilateral.

FGD dihadiri oleh 29 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya masing-masing, termasuk:

### 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas:

---

- Perwakilan dari berbagai direktorat, seperti Transportasi, Kelautan dan Perikanan, Perumahan, Perencanaan Pendanaan Pembangunan, dan Bilateral.
- Para ahli perencanaan dan analisis kebijakan yang berperan dalam penyusunan prioritas pembangunan dan perencanaan pendanaan proyek strategis.

## **2. Kementerian Keuangan (DJPPR):**

Direktorat Pinjaman dan Hibah yang memberikan wawasan tentang kondisi dan pengelolaan pinjaman luar negeri.

## **3. Kementerian Luar Negeri:**

Diplomat dari berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia Timur, dan Amerika, yang memberikan perspektif tentang hubungan bilateral dan geopolitik yang relevan dengan kerjasama pendanaan.

## **4. Kementerian lainnya**

- Kementerian PUPR, yang bertanggung jawab atas infrastruktur dan pengelolaan proyek besar.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): memberikan perspektif terkait proyek sektor kelautan.
- Kemendikbudristek: berkontribusi pada pandangan sektor pendidikan dan inovasi.

## **Hasil Akhir AHP**

Berikut adalah hasil bobot yang diperoleh untuk masing-masing dimensi dan sub-kriteria:

### **Financial (0.285)**

- F1 - Cost of debt and lending terms: 0.225
- F2 - Maximum loan amount: 0.126
- F3 - Long-term financial commitment: 0.201
- F4 - Transparency and accountability: 0.172
- F5 - Diversification of debt portfolio: 0.128
- F6 - Currency Stability: 0.148

### **Technical (0.379)**

- T1 - Feasibility Studies: 0.147
- T2 - Innovation, Technology, and Expertise Level: 0.086
- T3 - Technology Transfer Potential and Comprehensive Expertise Support: 0.193
- T4 - Development Assistance Provision: 0.139
- T5 - Flexible Conditionality and Support: 0.129
- T6 - Project Initiation and Implementation Processing Time: 0.128
- T7 - Institutionalization of Project: 0.178

### **Economic and Politics (0.162)**

- P1 - Strategic Diplomatic Relations and Economic Partnership: 0.281
- P2 - Commitment to Sustainable Development Goals (SDGs): 0.214
- P3 - Geopolitical Risk and Diplomatic Influence: 0.264
- P4 - Political Stability: 0.241

### **Law and Regulation (0.174)**

- L1 - Data Protection and Policy: 0.181
- L2 - Safeguards Related to Socio-economic, Environmental, and Land Use: 0.294
- L3 - Legal Framework on Good Corporate Governance: 0.243
- L4 - Ability to Comply with National Industrial Policy: 0.282

Tabel 4 – Kertas Kerja Pembiayaan Bilateral

Calon Lender	:				
Nama Proyek	:				
Deskripsi Proyek	:				
Nama <i>Expert</i> penilai	:				
Jabatan dan Institusi	:				
<b>1. Financial: 0.285</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skor (1-5)</b>	<b>Bobot x Skor</b>	<b>Total Dimensi</b>	<b>Bobot Dimensi</b>
F1 - Cost of debt and lending terms	0.225		0		
F2 - Maximum loan amount	0.126		0		
F3 - Long-term financial commitment	0.201		0	0	0.285
F4 - Transparency and accountability	0.172		0		
F5 - Diversification of debt portfolio	0.128		0		
F6 – Currency Stability	0.148		0		
<b>2. Technical: 0.379</b>					
T1 - Feasibility Studies	0.147		0		
T2 - Innovation Level	0.086		0		
T3 - Technology Transfer Potential and Comprehensive	0.193		0		
T4 - Development Assistance Provision	0.139		0	0	0.379
T5 - Flexible Conditionality and Support	0.129		0		
T6 - Project Initiation Processing Time	0.128		0		
T7 - Institutionalization of Project	0.178		0		
<b>3. Economic and Politics: 0.162</b>					
P1 - Strategic Diplomatic Relations and Economic Part	0.281		0		
P2 - Commitment to Sustainable Development Goals (	0.214		0	0	0.162
P3 - Geopolitical Risk and Diplomatic Influence	0.264		0		
P4 - Political Stability	0.241		0		
<b>4. Law, and Regulation: 0.174</b>					
L1 - Data Protection and Policy	0.181		0		
L2 - Safeguards Related to Socio-economic,	0.294		0	0	0.174
L3 - Legal Framework on Good Corporate Governance	0.243		0		
L4 - Ability to Comply with National Industrial Policy	0.282		0		
				<b>SKOR</b>	<b>0.00</b>

## 7. PILOT TEST DAN UMPAN BALIK

Sebagai langkah awal untuk menguji keefektifan kertas kerja penilaian pembiayaan proyek bilateral, pilot test dilakukan pada dua proyek strategis, yaitu SATRIA-2 dan IFP-IFM (Integrated Fishing Port-International Fish Market), yang melibatkan calon lender berbeda. Pilot test ini bertujuan untuk memvalidasi kerangka evaluasi kriteria, memastikan kesesuaian metode dengan kebutuhan proyek, dan mengidentifikasi umpan balik untuk penyempurnaan kertas kerja. Pilot test dilakukan dengan metode FGD yang dihadiri oleh para perencana dan ahli dari Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik mengenai kejelasan kriteria, relevansi dimensi, dan hasil yang diperoleh.

### Proyek 1: SATRIA-2

Proyek Penyediaan Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA-2) bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem komunikasi satelit SATRIA dan mempercepat pembangunan akses internet di seluruh Indonesia. Proyek ini bernilai USD 864.695.000, dengan opsi pembiayaan potensial dari UK Export Finance (UKEF) dan French Treasury.

Dengan menggunakan kertas kerja tersebut, UKEF dinilai unggul dengan skor 3.63 dibandingkan dengan French Treasury yang hanya mendapatkan skor 3.33. Dari aspek keuangan, UKEF menawarkan dukungan penuh nilai kontrak serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sementara dari aspek teknis, UKEF unggul dari segi fleksibilitas *conditionality* dan institusionalisasi proyek. Dalam aspek hukum dan regulasi, French Treasury menunjukkan komitmen yang kuat terhadap aspek komitmen terhadap social-ekonomi dan lingkungan, tetapi relative kurang *comply* dengan kebijakan industri Indonesia.

### Proyek 2: IFP-IFM

Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan fasilitas pelabuhan perikanan dan membangun pasar ikan bertaraf internasional. Proyek ini mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur, pemenuhan bahan baku industri pengolahan

dalam negeri, serta peningkatan ekspor. Calon lender yang dinilai adalah JICA (Jepang), AFD (Perancis), dan ADB (Asian Development Bank).

ADB dinilai lebih baik dibandingkan JICA dan AFD (skor 4.2 versus 3.95 dan 3.76). ADB unggul dalam aspek komitmen terhadap SDGs dan dukungan fleksibel terkait *conditionality*. AFD menunjukkan keunggulan dalam tingkat inovasi, teknologi, dan kepakaran. Sementara JICA menawarkan biaya pinjaman yang relatif lebih baik.

Beberapa poin penting pembelajaran dari *pilot project* ini antara lain:

- Kerangka evaluasi dianggap komprehensif dan mampu mencakup aspek strategis proyek.
- Penekanan pada dimensi teknis memberikan pandangan holistik untuk proyek berbasis teknologi seperti SATRIA-2.
- Perlu penyesuaian skor untuk kriteria transfer teknologi agar lebih sesuai dengan kebutuhan sektor spesifik.
- Perlu penyesuaian kertas kerja dalam menilai lender multilateral seperti ADB.
- Perluasan sumber data retrospektif dan prospektif untuk mendukung evaluasi lebih mendalam.

Implementasi kertas kerja berhasil menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam mengevaluasi dua proyek strategis ini. UKEF pada proyek SATRIA-2 dan JICA/ADB pada proyek IFP-IFM menjadi contoh nyata bagaimana kerangka kerja ini dapat membantu pemerintah dalam memilih lender yang sesuai. Pilot test juga memberikan wawasan penting untuk penyempurnaan kertas kerja, sehingga dapat diimplementasikan secara luas untuk proyek-proyek strategis nasional di masa mendatang.

## 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam konteks dinamika global yang semakin kompleks, kemampuan negara berkembang seperti Indonesia untuk memilih pemberi pinjaman yang sesuai mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan pembiayaan internasional. Dengan munculnya pemberi pinjaman alternatif seperti negara-negara BRIC, Indonesia memiliki peluang untuk mengeksplorasi sumber pembiayaan baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan tetapi juga memberikan nilai tambah seperti transfer teknologi dan pembangunan kapasitas lokal. Teori berbasis kebutuhan (*needs-based theory*) menekankan pentingnya menilai pemberi pinjaman berdasarkan keunggulan spesifik mereka.

Kertas kerja ini dikembangkan untuk memberikan alat bantu strategis dalam mengevaluasi dan memilih negara pemberi pinjaman terbaik untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pendanaan yang diterima selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia, termasuk target RPJMN 2025-2029 dan visi jangka panjang RPJPN 2025-2045. Ruang lingkup kertas kerja mencakup analisis kebijakan, pengembangan kriteria penilaian berbasis multi-dimensi, dan uji coba kerangka kerja melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Kertas kerja ini digunakan pada tahap pengambilan keputusan setelah proyek strategis memenuhi dua kriteria utama: (1) proyek memerlukan dukungan teknis mendalam karena kompleksitas teknologi, dan (2) proyek membutuhkan transfer teknologi dari negara pemberi pinjaman. Proyek yang memenuhi kriteria ini dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa negara pemberi pinjaman tidak hanya menyediakan pendanaan, tetapi juga mendukung keberhasilan jangka panjang proyek. Kertas kerja mencakup dua pendekatan asesmen: *Retrospective Assessment*, yang menilai rekam jejak historis negara pemberi pinjaman, dan *Prospective Assessment*, yang mengevaluasi potensi dukungan di masa depan.

### ***Proposed Framework: Empat Dimensi Penilaian***

Kerangka kerja kertas ini dirancang berdasarkan empat dimensi utama:

1. Dimensi Keuangan mencakup efektivitas biaya dan keberlanjutan pembiayaan.
2. Dimensi Teknis menilai dukungan teknis seperti studi kelayakan, transfer teknologi, dan inovasi.
3. Dimensi Ekonomi dan Politik mempertimbangkan stabilitas geopolitik, hubungan diplomatik, dan komitmen terhadap SDGs.
4. Dimensi Hukum dan Regulasi mengevaluasi tata kelola, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional.

Melalui metode AHP, Dimensi Teknis memiliki bobot tertinggi (0.379), menekankan pentingnya dukungan teknis dalam keberhasilan proyek. Sub-kriteria seperti Technology Transfer Potential (0.193) dan Institutionalization of Project (0.178) menjadi komponen kunci. Dimensi lainnya, seperti Keuangan (0.285), Hukum dan Regulasi (0.174), dan Ekonomi dan Politik (0.162), juga memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan evaluasi yang komprehensif.

Hasil pilot test menunjukkan bahwa kerangka kerja ini mampu memberikan panduan yang efektif dalam mengevaluasi pemberi pinjaman berdasarkan kebutuhan spesifik proyek. Evaluasi berbasis data retrospektif memberikan dasar empiris yang kuat, sementara pendekatan prospektif menawarkan fleksibilitas untuk mendukung keputusan strategis yang lebih holistik.

## **REKOMENDASI TINDAK LANJUT PEKERJAAN**

### **A. Pengembangan Platform Digital untuk Mengotomasi Kertas Kerja**

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses manual, direkomendasikan pengembangan platform digital khusus yang dapat mengotomasi pengisian dan penilaian kertas kerja. Platform ini dapat dirancang agar penilai tidak perlu lagi memasukkan data secara manual, sehingga mengurangi risiko kesalahan input dan meningkatkan efisiensi kerja. Sebagai contoh, platform ini dapat memanfaatkan teknologi berbasis machine learning untuk memproses data secara otomatis. Ketika penilai memasukkan program spesifik di suatu bidang dan lender dari negara tertentu, platform tersebut dapat memberikan rekomendasi penilaian komponen spesifik berdasarkan data publik yang telah tersedia atau diperkaya dalam sistem. Selain itu, platform ini dapat menyediakan fitur validasi otomatis untuk memastikan bahwa data yang diinput memenuhi standar kelayakan tertentu, sekaligus menyajikan hasil dalam visualisasi yang mudah dipahami. Pengembangan platform semacam ini juga akan mendukung pelacakan dan pemantauan data secara lebih terintegrasi.

### **B. Penguatan Kualitas Kertas Kerja dengan Memperkaya Database**

Kualitas kertas kerja dapat ditingkatkan dengan memperkaya basis data melalui pengumpulan data historis pinjaman bilateral yang terdahulu. Data-data ini, seperti performa pinjaman, efektivitas proyek, dan tingkat pengembalian, dapat menjadi rujukan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian skor di masa depan. Dengan memanfaatkan data historis ini, penilaian dapat dilakukan dengan lebih akurat dan berbasis bukti. Selain itu, penguatan database ini memungkinkan tim penilai untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam kerja sama bilateral sebelumnya, seperti preferensi lender tertentu terhadap sektor tertentu atau risiko yang sering terjadi dalam proyek bilateral. Hal ini juga akan mendukung proses benchmarking dengan proyek lain, sehingga setiap keputusan lebih informatif dan berbasis data yang solid.

### **C. Integrasi dengan Pendanaan Multilateral**

Keputusan pendanaan sering kali membutuhkan perbandingan antara skema bilateral dan multilateral. Sebagian negara peminjam seringkali memilih melakukan *channeling* pinjaman melalui institusi multilateral untuk mengurangi biaya dan berbagi risiko

(Reinsberg dkk, 2017). Namun, kertas kerja yang ada saat ini dirancang khusus untuk pembiayaan bilateral dan tidak relevan untuk skema multilateral. Untuk itu, diperlukan langkah integrasi antara kedua jenis pembiayaan ini. Ke depan, kertas kerja harus dirancang agar lebih fleksibel, mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antara pendanaan bilateral dan multilateral. Hal ini mencakup penyesuaian komponen dan dimensi penilaian yang relevan untuk kedua skema tersebut. Misalnya, pada pendanaan multilateral, komponen terkait sinergi lintas negara atau pengaruh terhadap stabilitas regional mungkin lebih penting dibandingkan skema bilateral. Dengan integrasi ini, proses penilaian akan lebih holistik, sehingga memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan pendanaan yang optimal berdasarkan perbandingan yang objektif dan menyeluruh. Selain itu, kertas kerja fleksibel ini akan mendorong terciptanya efisiensi dalam analisis pendanaan lintas skema, mempercepat proses penilaian, dan mendukung perencanaan pembiayaan yang strategis.

#### **D. Workshop Pengisian Kertas Kerja untuk Pakar dan Praktisi**

Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada para pakar dan praktisi di kementerian mengenai cara pengisian kertas kerja secara mandiri. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari langkah-langkah teknis pengisian, termasuk pemahaman skala penilaian dan penggunaan data pendukung. Workshop juga mencakup simulasi pengisian kertas kerja untuk memberikan pengalaman praktis sekaligus menyelesaikan potensi kendala teknis. Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta dapat mengisi kertas kerja secara konsisten dan independen tanpa perlu panduan tambahan.

## REFERENSI

Bunte, J. B. (2019). *Raise the debt: How developing countries choose their creditors*. Oxford University Press.

Reinsberg, B., Michaelowa, K., & Knack, S. (2017). Which donors, which funds? Bilateral donors' choice of multilateral funds at the World Bank. *International Organization*, 71(4), 767-802.

Morris, S., Parks, B., Gardner, A., & Parks, B. (2020). Chinese and World Bank lending terms: A systematic comparison across 157 countries and 15 years (No. 170). Washington, DC: Center for Global Development.

Onjala, J. (2018). China's development loans and the threat of debt crisis in Kenya. *Development Policy Review*, 36, O710-O728.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2018). *Global outlook on financing for sustainable development 2019: Time to face the challenge*. OECD.

Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G. (2024). *The SDGs and the UN Summit of the Future. Sustainable Development Report 2024*. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press